

**TAHUN  
2021**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Yogyakarta  
Jln.Kenari No.56  
(0274)515665  
dp3ap2kb@jogjakota.go.id**

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

KEPALA DP3AP2KB



Ir. Edy Muhammad

NIP 19630916 199203 1 006

## Ikhtisar Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dilakukan penggabungan antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

### a. Sasaran I

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%
		2021	2021	Capaian
Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	1.06	147.50%

### b. Sasaran II

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%
		2021	2021	Capaian
Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,11%	0,11%	100%

**c. Sasaran III**

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%
		2021	2021	Capaian
Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,12%	0,04%	166.67%

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman OPD dalam mendokumentasikan data pilah sebagai dasar perencanaan.
2. Peningkatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai wadah untuk konsultasi apabila keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga tidak berlanjut menjadi tindak kekerasan.
3. Terkait capaian CPR, perlu perubahan strategi layanan di fasilitas kesehatan dan kelompok sasaran komunitas tertentu, penambahan biaya recovery berupa suplemen untuk MOP dan MOW.
4. Diperlukan pertemuan lembaga layanan keluarga di wilayah untuk mendukung capaian 2 indikator program, pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
5. Perlu menyusun parameter keaktifan lembaga layanan keluarga untuk menghitung Jumlah Lembaga Layanan Keluarga yang aktif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Tugas dan Fungsi .....	2
1.3 Isu Strategis .....	5
1.4 Keadaan Pegawai .....	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....	7
1.6 Keuangan .....	11
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	15
2.1 Perencanaan Strategis .....	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	17
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan .....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	19
2.3 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2021.....	20
2.3.1 Target Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta .....	21
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	22
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	23
3.2.1 Sasaran Jumlah Penduduk Terkendali.....	23
3.2.2 Sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun.....	39
3.2.3 Sasaran kekerasan terhadap anak menurun .....	51
3.3 Realisasi Anggaran .....	62
3.4 Inovasi .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	75
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b> .....	78

# Daftar Tabel

---

Tabel 1.1 Data Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan .....	6
Tabel 1.2 Data Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan .....	6
Tabel 1.3 Keadaan sarana dan prasarana .....	7
Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Tahun 2021 .....	12
Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2021 .....	12
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 .....	16
Tabel 2.2 Sasaran Strategis .....	17
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	18
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	20
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	20
Tabel 2.6 Target APBD Perubahan Tahun 2021 .....	21
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .....	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	22
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	23
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	23
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	24
Tabel 3.5 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .....	27
Tabel 3.6 Indikator program kualitas keluarga .....	28
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	28
Tabel 3.8 Indikator program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak .....	29
Tabel 3.9 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	29
Tabel 3.10 Indikator program Pengendalian Penduduk.....	30
Tabel 3.11 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	30
Tabel 3.12 Indikator program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) .....	31
Tabel 3.13 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	31
Tabel 3.14 Indikator program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) .....	32
Tabel 3.15 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	32

Tabel 3.16 Unmet Need Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2021 .....	36
Tabel 3.17 CPR Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2021.....	37
Tabel 3.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	39
Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	39
Tabel 3.20 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .....	43
Tabel 3.21 Indikator program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ...	44
Tabel 3.22 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	45
Tabel 3.21 Indikator program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ...	44
Tabel 3.22 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	45
Tabel 3.23 Indikator program Perlindungan Perempuan .....	46
Tabel 3.24 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	46
Tabel 3.25 Kelembagaan PUG kota Yogyakarta .....	48
Tabel 3.26 OPD yang melaksanakan PPRG.....	49
Tabel 3.27 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	51
Tabel 3.28 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	52
Tabel 3.29 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .....	52
Tabel 3.30 Indikator Program Pemenuhan Hak Anak .....	55
Tabel 3.31 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	55
Tabel 3.22 Indikator Program Perlindungan khusus Anak .....	56
Tabel 3.31 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	55
Tabel 3.32 Indikator Program Perlindungan khusus Anak .....	56
Tabel 3.33 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya .....	57
Tabel 3.34 Realisasi Tahun Anggaran 2021.....	62
Tabel 3.35 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021 .....	62
Tabel 3.36 Realisasi Belanja Langsung 2021 .....	62
Tabel 3.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021.....	65
Tabel 3.38 Analisis efisiensi.....	66



# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Tugas dan Fungsi*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKIP*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.1 Bagan struktur organisasi DP3AP2KB

### 1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, susunan organisasi DP3AP2KB terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Bidang Pengendalian Penduduk dan Data, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional yang masing masing mempunyai tugas.

## **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **Sekretariat**

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian.

### **2. Sub Bagian Keuangan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.

### **3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

## **Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

### **1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

### **2. Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan.

### **Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

1. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di seksi Pemenuhan Hak Anak.

2. Seksi Perlindungan Anak

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di seksi perlindungan anak.

### **Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

1. Seksi Keluarga Berencana

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di seksi keluarga berencana.

2. Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di seksi pembinaan dan pembangunan keluarga.

### **Bidang Pengendalian Penduduk dan Data**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pengendalian penduduk dan data.

1. Seksi Pengendalian Penduduk

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di seksi Pengendalian Penduduk.

2. Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di seksi data informasi gender anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## **UPT PPA**

UPT PPA merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan berbasis gender, UPT PPA dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Fungsi**

Untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta pelaksanaan ketatausahaan.

UPT PPA mempunyai fungsi penyelenggaraan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berbasis gender.

### **1.3 Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali, dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Masih belum optimalnya implementasi PUG melalui PPRG dalam proses perencanaan dan penganggaran;
3. Masih adanya kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan;
4. Kesenjangan akses perempuan dalam bidang ekonomi
5. Berkurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif secara tidak langsung berdampak pada tidak terangkatnya isu perempuan ke dalam wilayah publik;
6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak antara lain meningkatnya perkawinan di bawah umur, anak berhadapan dengan hukum (ABH), kehamilan tidak dikehendaki di kalangan remaja, tindak kekerasan di media online seperti pelecehan seksual, kasus pornografi, *cyber crime* dll;
7. Keterlibatan anak pada kegiatan pengendalian massa anak jalanan (manusia silver)
8. Terjadinya pandemi covid 19 yang menimbulkan dampak pada pengasuhan anak sehingga rentan terhadap terjadinya kekerasan.

### **1.4 Keadaan Pegawai**

- Per 31 Desember 2021 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebanyak 32 orang, terdiri dari : laki-laki 7 orang ( 21,87% ) dan perempuan 26 orang ( 78,13% ).

- Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

**Tabel 1.1 Data kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan**

JABATAN STRUKTURAL	PANGKAT/GOL	JUMLAH
Kepala	Pembina Utama Muda, IV/C	1 orang
Sekretaris	Pembina Tk I / IV b	1 orang
Kepala Bidang	1. Pembina / IV a	1 orang
	2. Penata Tk. I / III.d	3 orang
Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I / III.d	3 orang
Kepala Seksi	1. Pembina / IV.a	1 orang
	2. Penata Tk. I / III.d	6 orang
	3. Penata / III.c	1 orang
Fungsional Umum	1. Penata Tk. I / III.d	1 orang
	2. Penata Muda Tk I / III.b	4 orang
	3. Penata Muda / III.a	6 orang
	4. Pengatur Tk. I / II.d	1 orang
	5. Pengatur II/c	1 orang
Kepala UPT	Penata / III.c	1 orang
Kepala Sub Bagian TU UPT	Penata / III.c	1 orang

- Berdasar tingkat pendidikan

**Tabel 1.2 Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Kategori	Pendidikan				
		SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Eselon IIb				1	
2	Eselon III a				1	
3	Eselon IIIb				4	
5	Esselon IV a				9	3
6	Eselon IV b				1	
7	Fungsional Umum		5	2	6	
8	Fungsional tertentu					
	Jumlah		5	2	22	3

Jumlah pegawai ideal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sesuai analisa jabatan adalah

sebanyak 86 orang, namun pegawai asn yang ada 32 orang, tenaga teknis 26 orang, tenaga bantuan 6 orang, sehingga baru terpenuhi sebesar 64 orang atau 74,42% .

### 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta relatif mencukupi meskipun masih diperlukan penambahan/perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Keadaan sarana dan prasarana**

No	Nama Barang	Jumlah
1	AC	37
2	Access Point	8
3	Aipon	1
4	AIR PURIFIER	3
5	Alamari Arsip Pintu Sliding	4
6	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	11
7	Alat Peraga Edukatif	2
8	Almari buku	1
9	Almari Arsip	1
10	Almari Arsip Kayu Lereg Kaca	1
11	Almari besi 2 pintu	10
12	Almari Besi Lereg Kaca	18
13	Almari Buku	7
14	Almari Display Kaca	2
15	Almari es 2 pintu	1
16	Almari Etalase	1
17	Almari Kayu	13
18	Almari Lereg Kaca	2
19	Almari Locker Rak	1
20	Almari Pakaian	1
21	Amplifier	1
22	APE	1
23	Ayunan Bulat	1
24	Baby Dress Table	1
25	Backdrop	1
26	Balok Natural	1
27	Box bayi	10
28	Brankas	2
29	Burung Garuda	1
30	Camera	1
31	CCTV	2

32	Cermin	1
33	Contener Box Besar	10
34	Dipan	1
35	Dispenser	14
36	Exhaust Fan	5
37	Feling Cabinet	44
38	Fingerspot (Mesin Absensi)	2
39	Gordein	5
40	Hand Dryer	1
41	Handphone	1
42	Handycam	1
43	HP hoflen	1
44	Jam Dinding	17
45	Jembatan Goyang + Tangga Pelangi	1
46	Join Table 1/2 Lingkaran	4
47	Kaca Hias / Pigura / Alat Hiasan	1
48	Kalkulator	12
49	Kamera	1
50	Kamera CCTV	1
51	Kamera Foto Digital	5
52	Kamera video Digital	3
53	Kardek besi	1
54	Karpet	9
55	Kasur vinil 120 x 200 m	8
56	Kendaraan Roda 4	2
57	Kipas,duduk, gantung, berdiri,baling2	39
58	Kompor Gas	1
59	Komputer	56
60	Komputer Tablet	2
61	KORDEN	1
62	Kuda Goyang	1
63	Kuda Goyang A	2
64	Kulkas	8
65	Kursi Biasa/staff	2
66	Kursi Putar Sandaran Rendah	2
67	Kursi Susun	150
68	kursi besi	6
69	Kursi Besi Bentuk Payung	1
70	Kursi biasa	8
71	Kursi duduk Besi Minimalis	1
72	Kursi Hadap Size / Zice	2
73	Kursi Kerja	42
74	Kursi Kuliah Lipat	131
75	Kursi Makan Anak	24
76	Kursi Pameran	29

77	Kursi Putar	42
78	Kursi Rapat	46
79	Kursi rapat / lipat	69
80	Kursi rapat / susun	2
81	Kursi Rapat Lipat	30
82	Kursi Sidang	2
83	Kursi Tamu/Sice	1
84	Kursi tunggu 4 seat besi	5
85	Lap Top (Note Book)	5
86	Laser Pointer	3
87	Layar LCD	5
88	LCD	30
89	Lemari Kaca	25
90	Main Distribution Frame (MDF) + Lsa Krone kap. 20 pair	1
91	Media Edukasi	1
92	Megaphone	1
93	Meja 1 Biro	65
94	Meja Edukit	1
95	Meja Ganti Popok	2
96	Meja Kayu	40
97	Meja Knap	7
98	Meja komputer	6
99	Meja Konseling	5
100	Meja Kursi Tamu	1
101	Meja Lipat	4
102	Meja Makan Anak Kayu Oval	4
103	Meja Rapat	36
104	Meja resepsionis	1
105	Meja setengah lingkaran	6
106	Meja Tambahan	1
107	Mesin Cuci	4
108	Mesin Faximile	2
109	Mesin Ketik	5
110	Mesin Pompa Air	1
111	Mesin presensi sidik jari	1
112	Mesin Tik	1
113	Mic stand	2
114	Mic Wireless	1
115	Microphone	2
116	Minibus	6
117	modal meja lipat ( Hand made )	20
118	Modala Rangka Beddrop Portable	1
119	Note Book	42
120	Obsgyn bed	2

121	Panjatan Jala	1
122	Papan Nama	188
123	PC Komputer	17
124	Pengeras Suara	1
125	Perlengkapan Display Pameran	1
126	Personal Komputer	2
127	Pigura Gambar Wakil Pres.	2
128	Pigura Gambar pres	2
129	Player	1
130	Pointer	9
131	Pompa Air	2
132	Printer	60
133	Projector	3
134	Prosotan 5 tangga	1
135	Rail Arcello	1
136	RAK BESI	24
137	Rak Buku	12
138	Rak Dispenser	1
139	Rak Display Kain	15
140	Rak Front Office	1
141	Rak Kayu	6
142	Router	1
143	Running Teks Media Informasi Kependudukan	1
144	Scanner	6
145	Sepeda	2
146	Sepeda Motor	64
147	Sice/Kursi Tamu	1
148	Signage	1
149	Smart Televisi	1
150	Smartphone	23
151	Sofa	9
152	Sound System	6
153	Speaker	2
154	Sprayer	4
155	Station Wagon	2
156	Switch Hub	2
157	Tabung Gas	3
158	Tabung Pemadam	1
159	Tangga Almunium	7
160	Tape Recorder	1
161	Televisi	5
162	Telphon	2
163	Tempat pot tanaman	4
164	Tempat Sampah	7

165	Terminal Box Telepon (TBT-1) + Lsa Krone kap. 10 pair	2
166	Thermogun	10
167	Tiang Bendera	1
168	Tiang Join Bulat+Plat Ring Chrome	4
169	Tiang Mic Berdiri	2
170	Timbangan injak	1
171	Trolley Barang Beroda	3
172	TV 21 inchi	1
173	UPS	4
174	Vaccum Cleaner	3
175	Vertical Blind	1
176	Wall Exhaust fan	6
177	Wallmount	2
178	Wastafel portabel	2
179	White Board	20
180	Wireles sound system	2
181	Wireles cassette unit	13
182	Zice	5
183	Web cam	7
184	Gantungan Jas	3
185	Genset	1
186	Handy Talky (HT)	3
187	Head Set	3
188	Jemuran	2
189	Kotak Surat	1
190	Pallet	17

Terkait dengan kebutuhan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk kebutuhan peralatan inventaris aset daerah juga sudah sesuai dengan beban kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 berasal dari APBD dan DAK. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 16.364.558.425 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 5.468.606.740 dan belanja langsung sebesar Rp 10.895.951.685 yang diperuntukkan baik untuk

mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 6.367.592.685 dan DAK Rp 4.528.359.000 yang didukung oleh 10 program dan 71 kegiatan.

**Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp5.468.606.740	33,42%
2	Belanja Langsung	Rp10.895.951.685	66,58%
Jumlah Anggaran		Rp16.364.558.425	100%

Sumber : APBD-P Kota Yogyakarta, 2021

**Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2021**

Program	Anggaran Perubahan (RP)	Bobot Pagu
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	802.883.976	4,91%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.146.517.951	7,01%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.040.000	0,05%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.253.998.861	7,66%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	849.129.990	5,19%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	247.305.000	1,51%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.370.989.627	45,04%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	274.305.900	1,68%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.288.748.780	20,10%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.122.638.340	6,86%
<b>Jumlah</b>	<b>16.364.558.425</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : APBD-P Kota Yogyakarta, 2021

## **1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya,
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang

sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

# BAB 2

## Perencanaan Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2021*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2021*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan manifestasi komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022**

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai OPD utama yang mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Keberdayaan Masyarakat Meningkat dengan indikator capaian sasaran Indeks Keberdayaan Masyarakat dan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat” dengan indikator sasarannya adalah “Angka Harapan Hidup”

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pendukung untuk sasaran daerah Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, Kualitas pendidikan meningkat, dan Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Jumlah penduduk terkendali
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

#### Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan					
				2017	2018	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	anak	2	2	2	2	2	2
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,65%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,74%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%

### 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

**Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan**

1	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	Kekerasan terhadap anak menurun	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Kekerasan terhadap anak menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Jumlah penduduk terkendali	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota
			penyediaan layanan bagi keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	anak	2
2	Perlindungan Perempuan dan Anak meningkat	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,11
		Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,12

Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan agar kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih terukur. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	anak	2
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,11
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,12

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 17.966.029.751. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.445.169.740 dan Belanja Langsung Rp 7.483.265.620. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 16.364.558.425 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 5.468.606.740 dan belanja langsung sebesar Rp 10.895.951.685.

**2.3.1 Target Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Tabel 2.6**

**Target Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana APBD Perubahan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp5.468.606.740	33,42%
2	Belanja Langsung	Rp10.895.951.685	66,58%
Jumlah Anggaran		Rp16.364.558.425	100%

**2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk terkendali	Rp 7.370.989.627	45,04%	APBD , DAK
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Rp 1.949.401.927	11,91%	APBD , DAK
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Rp 2.103.128.851	12,85%	APBD , DAK

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2021*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	anak	2	1.06	147.50%
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,11	0,11%	100%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,12	0,04%	166.67%

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator. Pada tahun 2021, ketiga indikator telah memenuhi target yang ditetapkan dan **tercapai  $\geq 100\%$** . Capaian yang tertinggi pada indikator prevalensi kekerasan terhadap anak dengan persentase 166,67% , sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah dibandingkan dengan indikator lainnya adalah indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dengan capaian 100%.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### 3.2.1 Sasaran Jumlah penduduk terkendali

Tolok ukur capaian sasaran **Jumlah penduduk terkendali** diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Jumlah anak dibagi jumlah keluarga

Kinerja sasaran Jumlah penduduk terkendali dengan indikator Rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	1.2	2	1.06	147.50%	2	147.50%

Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan , Salah satu cara yang cukup efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk adalah dengan mencanangkan program keluarga berencana atau dan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengendalian Penduduk.

Keluarga Berencana merupakan program pemerintah bagi rakyat Indonesia untuk membatasi jumlah anak, dimana dalam satu keluarga cukup memiliki 2 orang anak saja

Untuk Rata-rata jumlah anak dalam keluarga dihitung dengan menggunakan formula jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga

Jumlah anak

----- =

Jumlah keluarga

**148.082**

----- = **1.06**

**140.288**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, terkait Sasaran Strategis yaitu Jumlah Penduduk Terkendali, pada tahun 2021 Dinas P3AP2KB berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan Indikator Penilaian Kinerja Rata-rata jumlah anak dalam keluarga, dari target yang telah ditentukan pada tahun 2021 sebanyak rerata 2, Dinas P3AP2KB bisa mencapai angka rerata 1,6 dengan tingkat capaian sasaran tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 147.50%,

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya berkat optimalisasi pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk melalui kegiatan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengendalian Penduduk yang diwujudkan dalam Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) untuk Pendidikan kependudukan sejak dini dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian dampak kependudukan melalui pemangku kepentingan dalam hal ini bersinergi

dengan para Tokoh Agama yang tergabung dalam Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU). Selain itu di kota Yogyakarta juga telah terbentuk 45 Kampung KB dan 26 Rumah Data Kependudukan yang mendukung dalam peningkatan kepedulian serta pengetahuan masyarakat akan program pengendalian penduduk.

Selain itu Keberhasilan capaian sasaran ini tidak lepas dari keberhasilan internalisasi NKKBS (Norma Keluarga kecil bahagia Sejahtera) yang sejak lama digulirkan Pemerintah melalui BKKBN. Slogan DUA ANAK CUKUP telah direbranding menjadi DUA ANAK LEBIH SEHAT, dan tagline BERENCANA ITU KEREN merupakan upaya untuk merevitalisasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan, dan Keluarga Berencana) , sehingga lebih mendekatkan pada kaum milenial agar sesuai dengan perkembangan jaman. Hal ini sejalan dengan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilaksanakan secara serentak secara Nasional, diperoleh hasil bahwa sebanyak 76,92% Pasangan usia Subur yang masih menginginkan jumlah anak 2 orang, sedangkan 3,13% yang bahkan menginginkan tidak mempunyai anak dan mempunyai 1 orang anak.

Situasi pandemi covid 19 ini sedikit banyak telah merubah mindset masyarakat untuk lebih menunda keinginan mempunyai anak lagi, hal ini terlihat dari menurunnya CBR (Crude Birth Rate/Angka Kelahiran Kasar), yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran dibandingkan jumlah penduduk dikalikan 1.000 penduduk, yaitu 6,53 CBR. Angka tersebut dapat dibaca bahwa disetiap 1.000 penduduk terdapat hanya 6 sampai 7 kelahiran saja. Apabila dibandingkan tahun 2020, yaitu 7,48 CBR, terjadi penurunan 0,95 CBR.

Disamping keberhasilan Kota Yogyakarta dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui indicator-indikator tersebut diatas, terdapat fenomena kependudukan berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga 2021, yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya: terdapat 27,53% Kepala Keluarga (KK) yang berstatus Belum Kawin (4,63 %), Cerai Hidup (5,53%), dan Cerai Mati (17,36%) dari 89.092 KK. Dimana KK dengan status Belum Kawin dan Cerai Hidup paling tinggi dibandingkan 4 Kabupaten se DIY. Data tersebut dapat diartikan bahwa lebih dari seperempat KK yang ada di Kota Yogyakarta tidak berpotensi untuk menambah jumlah penduduk.

Fenomena ini merupakan tantangan untuk bisa dijadikan sebagai bahan kajian, dan sebagai tindak lanjut program kegiatan ke depan.



Pendataan Keluarga 2021



Rumah Data Kependudukan



Kampung KB



Sekolah Siaga Kependudukan



Baksos pelayanan KB



Visitasi faskes



Bimbingan dan pendampingan BKB



Bimtek Go Sahaja

**Tabel 3.5 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi										
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	1.25	2	1.24	2	1.22	2	1.21	2	1.06	2	

3.2.1.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 2 Target kinerja tersebut dapat tercapai 1.06 sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 147.50%.

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berupa jumlah penduduk terkendali terealisasi 2 atau tingkat capaian 147.50% sehingga berpredikat **tercapai amat baik**.

Sedangkan untuk indikator program, semua indikator dapat tercapai sangat baik karena masing-masing indikator program dapat terealisasi melampaui target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :

**Tabel.3.6 Indikator program kualitas keluarga**

No.	Indikator Program	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	67.47%	73.36%	78.31%	
2.	Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	5.61%	5%	

**Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
		2020	2021	2020		2021	
				Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
a	Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif	-	67,47%	-	-	73.36%	108.73%

b	Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	-	4%	-	-	5.61%	140.25%
---	--	---	----	---	---	-------	---------

**Tabel.3.8 Indikator program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

No.	Indikator Program	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah	-	-	-	-	-	-	-	-	62%	72%	72%	0,00%

**Tabel 3.9 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
		2020	2021	2020		2021	
				Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
a	Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah	-	62%	-	-	72%	116,13%

**Tabel.3.10 Indikator program Pengendalian Penduduk**

No.	Indikator Program	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	8.77 CBR	11-10 CBR	8.64 CBR	11-10 CBR	8.12 CBR	11-10 CBR	7.48 CBR	11-10 CBR	6.53 CBR	11-10 CBR	0,00%

**Tabel 3.11 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
				2020		2021	
		2020	2021	Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	11-10 CBR	7.48	126.55%	6.53	140.64%

**Tabel.3.12 Indikator program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

No.	Indikator Program	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11.40%	13.74%	13%	15.13%	11.28%	9.38%	11.22%	10.84%	11.16%	11.15%	11.10%	0,00%
2	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.66%	70.18%	70.18%	68.19%	73.77%	77.91%	73.83%	73.17%	73.94%	69.90%	74%	0,00%

**Tabel 3.13 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
				2020		2021	
		2020	2021	Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11.22%	11.16%	10.84%	103.39	11.15%	100.09
2	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.83%	73.94%	73.17%	99.11%	69.90%	94.54%

**Tabel.3.14 Indikator program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

No.	Indikator Program	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	27.15%	26.91%	27.80%	25.93%	29.70%	27.27%	31.12%	28.70%	32.58%	32.59%	34.00%	

**Tabel 3.15 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
		2020	2021	2020		2021	
				Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	31.12%	32.58%	28.70%	92.22%	32.59%	100.03%

3.2.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan tiap tiap indikator program yang mendukung sasaran jumlah penduduk terkendali dijabarkan sebagai berikut :

a. Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif

Untuk indikator lembaga layanan keluarga yang aktif adalah indikator program baru di tahun 2021 pada program kualitas keluarga , di tahun 2021 indikator program ini berhasil terealisasi sebesar 73.66% dari target sebesar 67.47%, untuk tingkat capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 108.73%, capaian tersebut didukung karena adanya adanya pendampingan tingkat kota dan peningkatan kapasitas bagi Lembaga.

Faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Belum ada sistem pelaporan khusus tentang layanan keluarga di wilayah	a. pertemuan koordinasi dengan OPD Pembina layanan keluarga b. melaksanakan pendataan dengan melibatkan unsur kelembagaan masyarakat
2	Belum ada parameter keaktifan lembaga	Kordinasi untuk menyusun parameter keaktifan lembaga

b. Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga

Untuk indikator persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga adalah indikator program baru di tahun 2021 pada program kualitas keluarga , pada tahun 2021 berhasil terealisasi sebesar 5.61% dari target sebesar 4% , untuk tingkat capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 140.25%, Keberhasilan indikator persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga dalam mencapai target didukung dengan adanya banyaknya lembaga layanan keluarga yang ada di wilayah.

Faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Sinergi antar lembaga layanan keluarga di wilayah belum optimal.	Perlu diadakan pertemuan lembaga layanan keluarga di wilayah

c. Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah mencapai tingkat keberhasilan sebesar 116,13%, di mana dari target 62% terealisasi sebesar 72% , keberhasilan indikator ini didukung dengan meningkatnya pemahaman OPD dalam melaksanakan data pilah dan didukung dengan kegiatan Sosialisasi PUG, FGD pemanfaatan data gender dan anak, dan pelatihan.

OPD yang melaksanakan data pilah diantaranya :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Dinas Perdagangan
6. Dinas Pertanian dan Pangan
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
12. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18. Sekretariat DPRD
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20. Inspektorat
21. RSUD
22. Kemantren Gedongtengen
23. Kemantren Wirobrajan
24. Kemantren Mantrijeron
25. Kemantren Kraton
26. Kemantren Gondomanan
27. Kemantren Pakualaman
28. Kemantren Mergangsan

29. Kemantren Kotagede
30. Sekretariat Daerah
31. Bagian Tata Pemerintahan
32. Bagian Hukum
33. Bagian Kesejahteraan Rakyat
34. Bagian Administrasi Pembangunan
35. Bagian Umum dan Protokol
36. Bagian administrasi dan keuangan

Faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurangnya pemahaman OPD dalam mendokumentasikan data pilah sebagai dasar Perencanaan.	Perlu diadakan pertemuan OPD untuk memberikan sosialisasi terkait cara mendokumentasikan data pilah sebagai dasar Perencanaan

d. Indikator program CBR (Crude Birth Rate)

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja CBR (Crude Birth Rate) mencapai tingkat keberhasilan sebesar 140.64%, di mana dari target 10-11 CBR terealisasi sebesar 6.53, keberhasilan tercapainya indikator tersebut didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Pembinaan Kampung KB baik melalui Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan , Pertemuan Pokja Kampung KB , Pertemuan Kampung KB berbasis Tribina
2. Menyampaikan informasi-informasi terkait program Banggakencana melalui kegiatan SSK dan Fapsedu
3. Selain kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Yogyakarta dan DAK , Bidang PPD khususnya Pengendalian Penduduk juga melakukan kegiatan bekerjasama dengan DP3AP2 DIY dengan kegiatan Sosialisasi dampak kependudukan dan Arah Kebijakan DP3AP2 DIY TAHUN 2022 untuk Fapsedu
4. Monitoring dan Evaluasi program pengendalian penduduk melalui sosialisasi Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan bersama dengan BKKBN Perwakilan DIY Implementasi Materi Pendidikan Kependudukan di SMP Kanisius Gayam, SMP Muhammadiyah 1 , SMP Negeri 3 Yogyakarta serta SMP Negeri 15 Yogyakarta. Di mana tujuan sosialisasi ini adalah menguatkan pemahaman para guru dan karyawan akan pentingnya Pendidikan Kependudukan serta sebagai tahapan lanjutan dalam rangka pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di empat sekolah tersebut

sehingga ditahun 2021, bisa menjadi SSK menyusul SMP Negeri 9 yang telah terlebih dahulu membentuk pada tahun 2019. Kegiatan-kegiatan program pengendalian penduduk tersebut didokumentasikan dan telah dipublikasikan dalam website dan media sosial DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

- e. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*)  
Unmet need didefinisikan sebagai persentase wanita menikah berusia 15-49 tahun yang tidak menggunakan kontrasepsi tetapi tidak ingin hamil dalam waktu 2 tahun ke depan (menjarangkan) dan tidak ingin memiliki anak lagi (membatasi). Semakin rendah persentase unmet need maka semakin banyak wanita usia subur menikah yang menggunakan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya.

Persentase unmet need dari target sebesar 11,16%, tercapai 11,15% menunjukkan hasil yang baik, meskipun di tengah pandemic, dapat mempertahankan capaian indicator ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi data yang dilakukan secara berkala untuk memantau pelaksanaan capaian target kinerja, sehingga dapat menekan angka unmet need melebihi target.

Tabel 3.16. Unmet Need Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS			JUMLAH PENYESUAIAN	% PENYESUAIAN
			IAT PENYESUAIAN	TIAL		
1	Tegalrejo	3525	170	176	346	9,82
2	Jetis	2005	72	158	230	11,47
3	Gondokusuman	3005	130	174	304	10,12
4	Danurejan	1464	57	170	227	15,51
5	Gedongtengen	1305	32	61	93	7,13
6	Ngampilan	1386	51	61	112	8,08
7	Wirobrajan	2247	143	180	323	14,37
8	Mantrijeron	2880	132	310	442	15,35
9	Kraton	1486	41	110	151	10,16
10	Gondomanan	1134	26	59	85	7,50
11	Pakualaman	771	30	67	97	12,58
12	Mergangsan	2667	60	123	183	6,86
13	Umbulharjo	6775	226	542	768	11,34

14	Kotagede	3651	221	243	464	12,71
<b>JUMLAH</b>		<b>34.301</b>	<b>1.391</b>	<b>2.434</b>	<b>3825</b>	<b>11,15</b>

f. CPR (Contraceptive Prevalence Rate)

Indikator kinerja CPR (Contraceptive Prevalence Rate) tercapai 69,90%, dari target sebesar 73,94%, atau 94,53%. Capaian ini mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2020 lalu tercapai 73,12%. Tidak tercapainya target indikator program ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti Pandemi covid-19 yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia, mengakibatkan perubahan yang sangat besar pada tatanan kesehatan, ekonomi, sosial dan psikologi masyarakat. Hal ini otomatis memberikan dampak yang sangat besar dalam tata kerja dan tata laksana kegiatan dan pembinaan yang dilakukan oleh DP3AP2KB, di mana kesertaan KB di masa pandemi mengalami kendala, diantaranya : calon akseptor menunda akses layanan KB di Puskesmas karena masih takut dengan situasi pandemic. Demikian pula terjadinya PPKM Darurat selama bulan Juli dan Agustus, faskes banyak yang menunda pelayanan KB karena takut tertular, meskipun sudah dilindungi dengan APD terstandar. Pada bulan Juni layanan di rumah sakit yang melayani MOW sudah mulai mengalami kelangkaan oksigen, sehingga calon akseptor yang sudah mendaftar terpaksa tidak dapat dilayani.

Berikut ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	PUS yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional masih cukup tinggi, yaitu 8%	Memperbanyak kerjasama dengan Faskes yang melayani Pelayanan KB melalui dana BOKB.

Tabel 3.17. CPR Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF	% KB AKTIF
			IUD	MOW	MOP	CO	IMPLAN	SUNTIK	PIL		
1	TR	3525	878	164	13	575	72	569	138	2.409	67,38
2	JT	2005	497	80	11	280	54	361	69	1.352	65,99
3	GK	3005	730	214	15	745	88	408	73	2.273	74,34
4	DN	1464	268	67	6	223	25	325	72	986	64,75
5	GT	1305	245	61	9	234	30	301	68	948	68,2

6	NG	1386	311	83	6	415	10	195	45	1.065	73,95
7	WB	2247	584	93	9	409	36	350	66	1.547	67,6
8	MJ	2880	676	127	3	561	42	325	103	1.837	62,5
9	KT	1486	438	91	8	281	38	315	67	1.238	82,17
10	GM	1134	273	75	29	181	11	215	55	816	71,25
11	PA	771	183	58	6	183	15	65	41	523	67,57
12	MG	2667	580	165	8	768	55	320	98	1.994	74,02
13	UH	6775	1400	292	24	1225	119	1120	295	4.475	66,94
14	KG	3651	791	153	10	698	63	695	105	2.515	67,63
<b>JUMLAH</b>		<b>34.301</b>	<b>7.835</b>	<b>1.709</b>	<b>143</b>	<b>6.698</b>	<b>644</b>	<b>5.422</b>	<b>1.191</b>	<b>23.978</b>	<b>69,90</b>

g. Persentase kelompok kegiatan bina keluarga

Target indikator kinerja persentase Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL, UPPKS) sebesar 32,58 tercapai 32.59. Keberhasilan ini tidak lepas dari digencarkannya sinergi antara DP3AP2 KB, TP PKK, dan PKB dalam menambah sasaran jumlah BKB yang disinergikan dengan Posyandu, Dapur Balita dan Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), serta PAUD. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Kota dalam mewujudkan penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitive termasuk pola asuh di BKB dan program parenting di PAUD.

3.2.1.3 Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan sekaligus.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi.

Sasaran Jumlah penduduk terkendali Telah mencapai kinerja sebesar 147,50% dengan efisiensi anggaran. Serapan anggaran sebesar 82,89% dari pagu Rp 4.941.038.020 atau efisiensi anggaran tercapai sebesar 17,11%. Efisiensi ini bisa tercapai dikarenakan kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana cukup tinggi.

### 3.2.2 Sasaran Kekerasan terhadap perempuan menurun

**Tabel 3.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah korban KDRT perempuan/ jumlah penduduk perempuan x 100%

Kinerja sasaran Kekerasan terhadap perempuan menurun dengan indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan menurun pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,10%	0,11%	0,11	100%	0,10%	90%

Data Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari membandingkan antara jumlah korban KDRT perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah korban KDRT Perempuan

-----

Jumlah Penduduk Perempuan

**235**

----- x 100% = **0,11 %**

**211.288**

Pada tahun 2021 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan mencapai 100% , di mana dari target sebesar 0,11%, terealisasi sebesar 0,11%, artinya untuk sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun dapat tercapai.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi covid-19 dipicu oleh kewajiban untuk WFH (work from home) atau tinggal di rumah. Faktor ketakutan menjadi penyebab peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut didukung dari berbagai

literatur, di antaranya yang termuat pada Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1 No. 1 (2020) yaitu jurnal yang berjudul Work From Home dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada jurnal tersebut menyatakan bahwa Kebijakan Work From Home (WFH) memperkuat peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik di perkotaan maupun pedesaan. Data Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan meningkat hingga 75%.

Komnas Perempuan juga mencatat telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan 2020 yang tercatat 2.400 kasus. ([www.cnnindonesia.com/nasional](http://www.cnnindonesia.com/nasional), 19 Agustus, 2021).

Data kekerasan yang meningkat di kota Yogyakarta ini juga dapat menunjukkan bahwa:

1. Kesadaran, kepedulian serta keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kekerasan semakin tinggi dengan adanya pengaduan melalui tatap muka maupun online melalui aplikasi SIKAP, TESA di nomor 0811 2848 404 serta [link.tr.eepuspagakenariyogyakarta](http://link.tr.eepuspagakenariyogyakarta)
2. UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga untuk pengaduan kekerasan sudah banyak dikenal masyarakat.
3. Peran satgas sigrak, puskesmas, Pengadilan Agama, penyintas kekerasan, jejaring/mitra kerja meningkat.
4. Dapur balita dimana pada meja 4 sebagai pojok konsultasi untuk berbagai permasalahan perempuan dan anak termasuk kekerasan .
5. Kegiatan PAAR EDI yang dilaksanakan oleh pokja 1 TP PKK Kota yang diinisiasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat bawah ( kelurahan)

DP3AP2KB berupaya terus menekan angka kekerasan dengan penanganan yang komprehensif. melalui jejaring kerja yang ada pada forum perlindungan korban kekerasan di tingkat kemantren maupun ditingkat kota.Selain itu, adanya upaya-upaya pencegahan dan kampanye anti kekerasan oleh semua pihak dan elemen melalui berbagai kegiatan seperti fragmen, film dan media edukasi yang lainnya.

Upaya pencegahan kasus kekerasan ini, dimulai dari keluarga. Ketahanan keluarga dengan melaksanakan 8 fungsi keluarga yaitu keagamaan, sosial-budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan dan 5 dimensi ketahanan keluarga yaitu ketahanan legalitas dan keutuhan lingkungan, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, ketahanan sosial budaya . Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat, kelompok tribina ( bina

keluarga lansia/BKL,bina keluarga balita/BKB,bina keluarga remaja/BKR).PIKR, PKK,pasangan usia muda dan stakeholder terkait.

Capaian pada tahun 2021 didukung dengan kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu dengan mensinergikan layanan yang berjejaring antara lain layanan kesehatan (RS, Puskesmas), hukum (kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PKBH UAD, LBH Jogja, PERADI), psikologis (Puskesmas, RSA, Ananda Mentari), layanan rumah aman (RDU, Rifka Annisa), rehabilitasi sosial (Dinas Sosial, BPRSW, BRSPA); pelayanan pendampingan hukum dan psikologi; melaksanakan kegiatan reintegrasi dan psiko edukasi dalam rangka meminimalisasi resiko berulangnya kejadian kekerasan di satu lokus, peningkatan kapasitas tentang perundangan kekerasan pada lokus, pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak (SIKAP, SIGA, SIMFONI). Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan mekanisme pelayanan berbasis gender terhadap korban kekerasan, maka dilakukan pula kegiatan koordinasi dengan lintas sektor, masyarakat dan Lembaga pemerhati perempuan dan anak (SAPDA, KPAI, FAKTA, LPA, Rifka Annisa WCC). Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pendampingan korban kekerasan yaitu dengan mengoptimalkan peran Satgas Sigrak,PKK,kampong KB,PIKR di wilayah melalui kegiatan penguatan kapasitas Satgas Sigrak dan pelatihan manajemen kasus di Kota Yogyakarta.

Strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa pandemi dengan kegiatan berjarak (bersama jaga keluarga kita) yaitu Pastikan Semua Keluarga Tetap di Rumah, Pastikan Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi, Pastikan Alat Perlindungan Diri Tersedia, Pastikan Menjaga Kebersihan Keluarga, Pastikan Membuat Tanda Peringatan, Pastikan Menjaga Jarak Aman, Awasi Keluar Masuk Orang dan Barang, Menyebarkan Informasi yang Benar, Aktifkan Media Komunikasi Warga , dan Aktifkan Rumah Rujukan

Strategi 10 Aksi Berjarak sebagai wujud implementasi pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak di masa pandemi. Upaya yang dilakukan dengan sinergi antara berbagai pihak dan berjejaring.

Optimalisasi peran Forum perlindungan Korban kekerasan Kota Yogyakarta dalam situasi pandemi Covid, pelatihan penanganan kasus kekerasan kepada 3 kemantren yaitu Wiroberajan, Mantrijeron, Kraton. Lokasi Khusus pendampingan ada di 4 kampung yaitu Sudagaran Tegalrejo, Gedongkiwo, Purbayan dan Ledok Timoho Muja-Muju.



Pendidikan Politik Perempuan



Pelatihan manajemen kasus



PPRG



gender corner



Sosialisasi P2WKSS



Sos Kesetaraan Gender Bagi DWP

**Tabel 3.20 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi										
1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,65%	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%	0,10%	0,12%	0,09%	0,11%	0,11%	0,10%	0,00%

3.2.2.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,11%. Target kinerja tercapai 0,11% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra 90%.

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berupa prevalensi kekerasan terhadap perempuan terealisasi 0,11% atau tingkat capaian 100% sehingga berpredikat **tercapai amat baik**.

Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun, ketiga indikator dapat tercapai sangat baik karena masing-masing indikator program dapat terealisasi melampaui target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.21 Indikator program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

No.	Indikator program	2017		2018		2019		2021		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	47,00%	51,00%	53%	57,45%	59,00%	63%	64.58%	86.46%	72,22%	72.22%	78,89%	0,00%
2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	24%	25%	36%	45,10%	47%	80,39%	58.82%	62.75%	83.33%	92.86%	83.33%	0%

**Tabel 3.22 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
				Thn 2020		Thn 2021	
		Thn 2019	Thn 2021	Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	64.58%	72,22%	86.46%	133.88%	72.22%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)	58.82%	83.33%	62.75%	106.67%	92.86%	111.44%

**Tabel 3.23 Indikator program Perlindungan Perempuan**

No.	Indikator program	2017		2018		2019		2021		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1.	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	74%	82,28%	76%	88,64%	78,00%	86,76%	80,00%	91.40%	83,20%	87.23%	86.88%	0,00%

**Tabel 3.24 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
		Thn 2019	Thn 2021	Thn 2020		Thn 2021	
				Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	80,00%	83.20%	91.40%	114,25%	87.23%	104.85%

### 3.2.2.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan tiap indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun dijabarkan sebagai berikut ::

#### a. Persentase kelembagaan PUG yang aktif

Capaian kinerja Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif pada tahun 2021 tercapai sebesar 72.22% dengan tingkat capaian 100% . Terdapat 65 kelembagaan PUG yang aktif dari total 90 kelembagaan PUG di Kota Yogyakarta .

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator persentase Persentase kelembagaan PUG yang aktif:

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Mutasi <i>focal point</i> PUG	Bersama Bappeda selaku ketua Pokja PUG mengkordinasikan tugas anggota pokja PUG (kepala OPD) dalam mengimplementasikan pembentukan focal point PUG dan monitoring
2	Belum pahamnya tim PUG terhadap data pilah sehingga belum semua data pilah dimanfaatkan	Adanya kerjasama dengan akademisi/lembaga sosial untuk penyelenggaraan pelatihan

Tabel 3.25 Kelembagaan PUG kota Yogyakarta

NO	Kelembagaan PUG	NO	Kelembagaan PUG	NO	Kelembagaan PUG
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	23	Kelurahan Bener	45	Kelurahan Ngupasan
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	24	Kelurahan Tegalrejo	46	Kemantren Pakualaman
3	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	25	Kelurahan Bumijo	47	Kelurahan Gunungketur
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26	Kelurahan Cokrodingrtan	48	Kemantren Mergangsan
5	Dinas Perdagangan	27	Kelurahan Gowongan	49	Kelurahan Brontokusuman
6	Dinas Pertanian dan Pangan	28	Kemantren Gedongtengen	50	Kelurahan Semaki
7	Dinas Lingkungan Hidup	29	Kelurahan Terban	51	Kelurahan Tahunan
8	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	30	Kelurahan Baciro	52	Kelurahan Pandeyan
9	Dinas Perhubungan	31	Kelurahan Demangan	53	Kemantren Kotagede
10	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	32	Kelurahan Klitren	54	Kelurahan Rejowinangun
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	33	Kelurahan Bausasran	55	Kelurahan Purbayan
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34	Kemantren Wirobrajan	56	Sekretariat Daerah
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35	Kelurahan Wirobrajan	57	Bagian Tata Pemerintahan
14	Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36	Kelurahan Patangpuluhan	58	Bagian Hukum
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	37	Kelurahan Pakuncen	59	Bagian Kesejahteraan Rakyat
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38	Kemantren Mantriijeron	60	Bagian Administrasi Pembangunan
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39	Kelurahan Mantriijeron	61	Bagian Umum dan Protokol
18	Sekretariat DPRD	40	Kemantren Kraton	62	Bagian Administrasi dan Keuangan
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41	Kelurahan Patehan	63	Sekretariat Bersama
20	Inspektorat	42	Kelurahan Ngampilan	64	Pokja Pug
21	RSUD	43	Kelurahan Notoprajan	65	Tim Teknis Pug
22	Kelurahan Kricak	44	Kemantren Gondomanan		

b. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG

Pada tahun 2021 dilaksanakan reviu renstra yang mengubah sumber data pada tahun 2021 dikarenakan adanya penggabungan kelembagaan yang menyebabkan jumlah OPD di Kota Yogyakarta yang semula 51 OPD menjadi 42 OPD. Untuk capaian kinerja pada tahun 2021 dikatakan berhasil karena telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 92.86% dari target 83.33% , di mana sudah 39 OPD dari 42 OPD yang telah melaksanakan PPRG .

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG adalah Adanya kerjasama dengan akademisi/lembaga social untuk penyelenggaraan pelatihan PPRG , pendampingan PPRG oleh OPD driver

Tabel . 3.26 OPD yang melaksanakan PPRG

NO	OPD	NO	OPD
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Dinas Kesehatan	22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	23	Sekretariat DPRD
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Satuan Polisi Pamong Praja	25	Inspektorat
6	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	26	RSUD
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27	Kemantren Tegalrejo
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28	Kemantren Jetis
9	Dinas Perdagangan	29	Kemantren Gedongtengen
10	Dinas Pertanian dan Pangan	30	Kemantren Gondokusuman
11	Dinas Lingkungan Hidup	31	Kemantren Danurejan
12	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	32	Kemantren Wirobrajan
13	Dinas Perhubungan	33	Kemantren Mantrijeron
14	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	34	Kemantren Kraton
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	35	Kemantren Ngampilan
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36	Kemantren Pakualaman
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	37	Kemantren Mergangsan
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38	Kemantren Umbulharjo
19	Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39	Sekretariat Daerah

Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG:

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Mutasi pegawai pengampu PPRG Dan komitmen dari Ka. OPD untuk menyusun PPRG	Pendampingan PPRG mulai dari penyusunan renja OPD bersama dengan OPD driver ( Bappeda , DP3AP2KB , inspektorat , BPKAD)
2	Pemahaman OPD terhadap kegiatan berbasis gender masih belum optimal	Adanya kerjasama dengan akademisi/lembaga social untuk penyelenggaraan pelatihan PPRG, pendampingan PPRG oleh OPD driver

c. Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Perempuan korban KDRT yang tertangani mencapai tingkat keberhasilan sebesar 104.85%, di mana dari target 83.20% jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah korban KDRT perempuan , realisasinya mencapai 87.23% dengan kasus kekerasan perempuan yang terselesaikan sebanyak 205 orang dari 235 orang korban.

Capaian kinerja tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 Persentase Perempuan korban KDRT yang tertangani tercapai sebesar 91.40% .

untuk indikator persentase perempuan korban KDRT yang tertangani didukung dengan adanya Komitmen dan sinergitas OPD, masyarakat, swasta, RS dan LSM untuk menangani kekerasan , Koordinasi dan penguatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Pelatihan penanganan kasus kekerasan di kemandren Wirobrajan, Kraton dan Mantriijeron, Melaksanakan sosialisasi tentang kekerasan di 4 kemandren lebih khusus ke 4 kelurahan, kelurahan Mujamuju Umbulharjo, Kel. Gedongkiwo Mantriijeron, Kel. Sudagaran Tegalrejo, Kel. Purbayan Kotagede

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator persentase perempuan korban KDRT yang tertangani:

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Selama masa pandemi, adanya keterbatasan untuk konseling tatap muka	Dilaksanakan secara online
2	Belum semua lembaga layanan memiliki sarana prasarana dan SDM kompatibel	Webinar dengan PKK dan untuk pencegahan kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3	Kurangnya media KIE untuk mensosialisasikan perlindungan perempuan	Pengadaan bahan KIE untuk kekerasan dan Bullying Pelatihan dan sosialisasi terkait kekerasan di wilayah/Kemantren dan dengan sasaran remaja

#### 1.2.2.3 Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran. Capaian keuangan sebesar 81.69% dari pagu Rp 1.949.401.927, sehingga tercapai efisiensi anggaran sebesar 18,31%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran disebabkan karena:

- pencegahan kekerasan dengan media online seperti website dan film
- sosialisasi dengan zoom meeting
- pemanfaatan jejaring kerja dalam pencegahan kekerasan dengan berbagai stakeholder, Lembaga kemasyarakatan, lsm dan akademisi.

#### 3.2.3 Sasaran Kekerasan terhadap anak menurun

**Tabel 3.27 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Jumlah korban KDRT usia anak/ jumlah penduduk usia anak x 100%

Kinerja sasaran Kekerasan terhadap anak menurun dengan indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak menurun pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.28 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,04%	0,12%	<b>0,04%</b>	<b>166.67%</b>	0,11%	<b>163.64%</b>

Data Prevalensi Kekerasan terhadap anak diperoleh dari membandingkan antara jumlah korban KDRT anak dibandingkan dengan jumlah penduduk anak dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah korban KDRT anak

-----

Jumlah Penduduk usia anak

**41**

----- x 100% = **0,04 %**

**110.292**

Pada tahun 2021 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap anak mencapai 166.67% , di mana dari target sebesar 0,12%, terealisasi sebesar 0,04%, artinya untuk sasaran kekerasan terhadap anak menurun dikatakan berhasil karena telah mencapai target pada tahun berjalan .

Apabila melihat data korban kekerasan yang masuk ke lembaga layanan anak di Kota Yogyakarta sebanyak 395, setelah dilakukan pemilahan data diketahui bahwa korban kekerasan anak yang penduduk Kota Yogyakarta adalah sebanyak 41 anak. Capaian pada tahun 2021 ini tentu saja atas dukungan berbagai pihak, di mana substansi Kota Layak Anak adalah merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, keluarga serta peran media massa dalam mendorong implementasi program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di berbagai sektor. Kepedulian dan peran orangtua, wilayah, sekolah, serta lingkungan menjadi point yang sangat penting dalam meminimalisir terjadinya korban kekerasan terhadap anak-anak , sehingga gerakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di masyarakat maupun sekolah perlu terus didorong dan ditingkatkan. Banyak upaya yang telah dilakukan di tahun 2021 seperti pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 9 Kelurahan , penguatan PATBM di 10 kelurahan, Penguatan kelembagaan yang ada di wilayah baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan untuk mendorong implementasi pemenuhan hak anak yang tertuang di dalam kluster 1-4, yang meliputi Hak Sipil Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dasar dan

kesejahteraan serta Pendidikan , pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Juga upaya perlindungan khusus yang tercantum dalam kluster 5.

Sebagai upaya menumbuhkan karakter anak yang baik , pembentukan Mesjid Ramah Anak dan Gereja Ramah anak diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mendidik karakter anak yang berakhlak dan berbudaya. Pemanfaatan waktu luang anak-anak di lingkungan yang tepat akan berdampak pada tumbuh kembang yang baik bagi anak-anak. Selain itu peran Puspaga sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga yang merupakan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk membangun keluarga yang berkualitas dengan program edukasi, layanan konseling dan penjangkauan bagi keluarga yang membutuhkan/keluarga yang bermasalah. Edukasi dilakukan baik secara langsung di sekolah, masyarakat serta keluarga juga melalui media yang ada.

Program Sekolah Ramah Anak yang sudah diinisiasi di 451 sekolah yang ada mulai tingkat TK,SD dan SLTP dimaksudkan sekolah sebagai satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan yang mampu menjamim hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan dan kebijakan dengan berpedoman pada kepentingan terbaik untuk anak.

Untuk mendorong hak partisipasi anak dalam pembangunan maka diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Anak di tingkat Kota Yogyakarta. Hasil Musrenbang Anak yang masuk dalam suara anak diharapkan bisa menjadi program kegiatan di opd terkait.

Atas inisiasi KPAID Kota Yogyakarta di tahun 2021 dibentuk 2 polsek ramah anak sebagai role model dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah amanat yang harus dilaksanakan dengan komitmen kuat agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan haknya serta mendapatkan penanganan yang tepat. Inisiasi terbentuknya Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (Forum SPPA) juga telah dilaksanakan dengan membangun komitmen bersama antara institusi yang terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.



Musrenbang anak



pembentukan SRA



Pendampingan PATBM



kelas parenting PUSPAGA



Inisiasi masjid ramah anak



inisiasi gereja ramah anak



Inisiasi forum SPPA

**Tabel 3.29 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2021		2021		2022	
			Target	Realisasi										
1	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,74%	0,05%	0,15%	0,03%	0,14%	0,06%	0,13%	0,04%	0,12%	0,04%	0,11%	

3.2.3.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,12%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 0,04% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 163.64%.

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berupa prevalensi kekerasan terhadap anak terealisasi 0,04% atau tingkat capaian 166.67% sehingga berpredikat **tercapai amat baik**.

Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap anak menurun, keempat indikator dapat tercapai sangat baik karena masing-masing indikator program dapat terealisasi mencapai target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.30 Indikator Program Pemenuhan Hak Anak**

No.	Indikator Program	2017		2018		2019		2021		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	31%	31,11%	53%	53,33%	66%	80%	90%	100%	100%	0,00%	100%	
2.	Persentase Puskesmas Ramah Anak	60%	55,56%	70%	72,22%	80%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	

3	Persentase Sekolah Ramah Anak ( Sekolah Negeri TK s/d SMP)	18,5%	17,12%	35%	35,14%	52%	61,26%	73.87%	77.48%	90,99%	100%	100,00%
---	--	-------	--------	-----	--------	-----	--------	--------	--------	--------	------	---------

**Tabel 3.31**  
Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
		Thn 2020	Thn 2021	Thn 2020		Thn 2021	
				Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	90%	100%	100%	111,11%	100%	100%
2	Persentase Puskesmas Ramah Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Sekolah Ramah Anak ( Sekolah Negeri TK s/d SMP)	73.87%	90.99%	77,48%	104,88%	100%	109.90%

**Tabel 3.32 Indikator Program Perlindungan khusus Anak**

No.	Indikator Program	2017		2018		2019		2021		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Tabel 3.33**  
**Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya**

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
		Thn 2020	Thn 2021	Thn 2020		Thn 2021	
				Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	<sup>f</sup> Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan adanya beberapa indikator yang mengalami peningkatan tingkat capaian dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2021 semua indikator, baik di program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak telah tercapai. Ada upaya-upaya percepatan/akselerasi pengembangan desa/kelurahan layak anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak pada tahun 2019, serta Sekolah Ramah Anak di tahun 2021. Percepatan perlu dilakukan mengingat bahwa pada dasarnya pembentukan Dekelana, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak adalah bagian dari strategi untuk pengembangan Kota Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak yang sudah diamanatkan dalam Perda No.1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

### 3.2.3.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

Untuk keberhasilan tiap tiap indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap anak menurun dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Persentase jumlah kelurahan layak anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase jumlah kelurahan layak anak mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, di mana dari target 100% jumlah kelurahan layak anak dibandingkan dengan jumlah seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta realisasinya mencapai 100% . Kinerja tersebut sudah tercapai sejak tahun 2020 yang mana 45 kelurahan di Kota Yogyakarta semuanya sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai Kelurahan Layak Anak. Tahun 2021 lebih difokuskan pada penguatan dan pendampingan esensi dari Kelurahan Layak Anak dalam hal Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Koordinasi dan sinergitas yang baik antara OPD terkait, pemangku wilayah, serta lembaga kemasyarakatan seperti PATBM, Forum Anak, Kampung Ramah Anak sebagai salah satu upaya dalam membangun komitmen yang kuat di wilayah dalam mendukung kebijakan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta. Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator persentase jumlah kelurahan layak anak :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Belum optimalnya komitmen bersama dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk alokasi anggaran . Adanya pandemi covid 19 sehingga permasalahan yang muncul di wilayah semakin komplek seperti kekerasan anak, pornografi serta perkawinan anak	Meningkatkan koordinasi, penguatan dan sinergitas dengan wilayah, lembaga kemasyarakatan serta Forum Anak dalam upaya mengimplementasikan program KLA . sampai pada tataran masyarakat. Menyediakan ruang untuk anak-anak beraktifitas dan berkreasi.

b. Persentase puskesmas ramah anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Puskesmas Ramah Anak mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, di mana dari target 100% ,jumlah puskesmas ramah anak dibandingkan dengan jumlah puskesmas di kota Yogyakarta realisasinya mencapai 100%. Pada tahun 2019 sudah terbentuk 18 puskesmas ramah anak dan sudah melampaui target sampai akhir tahun 2022. Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase puskesmas ramah anak adalah dengan Komitmen Kepala Dinas Kesehatan yang cukup tinggi dalam pemenuhan hak anak di bidang kesehatan melalui pelayanan ramah anak di puskesmas serta sudah terpenuhinya Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) Puskesmas. Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator Persentase puskesmas ramah anak:

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Di masa pandemi Monitoring & evaluasi puskesmas ramah anak belum dapat dilakukan karena beban di puskesmas dalam mengejar <i>herd immunity</i>	Mensinergikan layanan pusat pembelajaran keluarga dengan layanan psikolog di puskesmas
2.	Kondisi puskesmas yang terbatas luasannya sehingga tidak memungkinkan untuk pengembangan layanan	Diberikan penganugerahan / reward untuk layanan kesehatan ramah anak diharapkan dapat mendorong puskesmas untuk memenuhi indikator-indikator pelayanan ramah anak di puskesmas sesuai dengan pedoman dari Kementerian PPPA

c. Persentase sekolah ramah anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Sekolah Ramah Anak mencapai tingkat keberhasilan sebesar 109,9%, di mana dari target 90,99% jumlah Sekolah Ramah Anak dibandingkan dengan jumlah sekolah terealisasi sebesar 100% Capaian kinerja tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 persentase Sekolah Ramah Anak baru tercapai sebesar 77,48% atau sebanyak 86 sekolah dari 111 Sekolah di Kota Yogyakarta untuk TK, SD dan SMP Negeri, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 100% , atau sudah 111 sekolah negeri ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak.

Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya sekolah ramah anak selain sekolah negeri dikarenakan adanya kerjasama dengan yayasan/ormas penyelenggara sekolah swasta untuk pengembangan SRA di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan yayasan/ormas tersebut. Selain itu keaktifan beberapa sekolah yang telah menjadi Sekolah Ramah Anak lebih awal dalam mengkampanyekan kegiatan-kegiatan Sekolah Ramah Anak. Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator Persentase sekolah ramah anak:

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator Persentase sekolah ramah anak

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pembentukan Sekolah Ramah Anak di masa pandemi dapat dilaksanakan, namun esensi dari Sekolah Ramah Anak harus terus didorong agar implementasi perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dirasakan oleh siswa di sekolah.	Dilakukan Penguatan dan pendampingan untuk Gugus Tugas SRA dan Komite Perlindungan Anak yang sudah terbentuk di sekolah.  Penyusunan Petunjuk Teknis SRA sebagai pedoman untuk pelaksanaan di lapangan.

d. Persentase anak korban KDRT yang tertangani

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase anak korban KDRT yang tertangani mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, di mana dari target 100%, jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir dibandingkan dengan jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama, realisasinya juga mencapai target yaitu 100%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan dapat mempertahankan capaian dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 Persentase anak korban KDRT yang tertangani tercapai sebesar 100%, dan pada tahun 2020 juga tercapai sebesar 100%. Adapun jumlah korban anak sebanyak 41 orang dan semua dapat tertangani, faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator persentase anak korban KDRT yang tertangani adalah dengan adanya kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah locus kejadian, Sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya, mau bekerjasama dengan UPT PPA dan mendukung dalam penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi. Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator Persentase anak korban KDRT yang tertangani:

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masa pandemi mengakibatkan dampak yang multi sektor, termasuk adanya peningkatan kasus kekerasan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koordinasi lintas OPD/instansi antara lain Dinas Sosial, KPAI , PSM, UPT PPA, Dindikpora, Bagian Kesra, KPAI, Instansi vertikal, LSM, Bappeda untuk sinergitas yang lebih baik.</li> <li>b. Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan seperti PATBM, Kelana, Dekelana dan SRA untuk meminimalisir terjadinya kekerasan anak.</li> <li>c. Meningkatkan peran Puspaga dalam hal pencegahan melalui edukasi dan parenting maupun penjangkauan kepada anak/keluarga yang bermasalah.</li> </ul>

### 3.2.2.3 Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan. Dalam hal pendanaan, Sasaran kekerasan terhadap anak menurun telah mencapai kinerja sebesar 166.33% dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran didukung dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu karena adanya pandemi sehingga membuat terobosan baru dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang tidak menggunakan anggaran. Serapan anggaran sebesar 99,03% dari pagu Rp 2.103.128.851, sehingga efisiensi tercapai sebesar 0,97%. upaya untuk tetap melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak Pada musim pandemi covid-19 yang membawa konsekuensi terhadap pembatasan kegiatan untuk menghindari kerumunan dan penyebaran covid-19 didukung dengan teknologi melalui online/daring. Selain itu juga mengoptimalkan jejaring dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat. Juga upaya-upaya dalam membangun komitmen bersama bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tugas dan tanggungjawab bersama semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, kampus, media massa dan tidak ketinggalan keluarga.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD dan DAK Tahun Anggaran 2021 dengan total anggaran sebesar Rp 16.364.558.425,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.717.896.731,36 , tingkat capaian untuk tahun 2021 yaitu 89.94%.

**Tabel 3.34 Realisasi Tahun Anggaran 2021**

No	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2021	16.364.558.425	14.717.896.731,36	89.94%

Sumber : Fungsional Keuangan DP3AP2KB, 2021

#### 3.3.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 5.120.165.703,- dari total anggaran Rp. 5.468.606.740,- tingkat capaian untuk tahun 2021 adalah sebesar 93.63%

**Tabel 3.35 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian 2021
1	Belanja Pegawai	5.468.606.740	5.120.165.703	93.63%

Sumber : Fungsional Keuangan DP3AP2KB, 2021

#### 3.3.2 Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 9.597.731.028 dari total Rp 10.895.951.685, anggaran tingkat capaian untuk tahun 2021 adalah sebesar 88.09% .

**Tabel 3.36 Realisasi Belanja Langsung 2021**

Program	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
	(RP)		
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Rp 802.883.976	Rp 764.780.526,64	95,25%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rp 1.146.517.951	Rp 827.660.389,68	72,19%

<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Rp 8.040.000	Rp 8.039.000,00	99,99%
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Rp 1.253.998.861	Rp 1.245.305.478,04	99,31%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Rp 849.129.990	Rp 837.390.590,00	98,62%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Rp 247.305.000	Rp 245.229.000,00	99,16%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (tanpa gaji)</b>	Rp 1.902.382.887	Rp 1.827.123.211	96,04%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Rp 274.305.900	Rp 268.297.760,00	97,81%
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Rp 3.288.748.780	Rp 2.509.896.933,00	76,32%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Rp 1.122.638.340	Rp 1.064.008.140,00	94,78%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10.895.951.685</b>	<b>Rp 9.597.731.028</b>	<b>88,09%</b>

*Sumber : Fungsional Keuangan DP3AP2KB, 2021*

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 88.09% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86.40%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.25%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran kekerasan terhadap anak menurun (99.03%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Kekerasan terhadap perempuan menurun (81.69%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021

telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	1.06	147.50%	Rp 4.941.038.020	Rp 4.095.470.833,00	82,89%
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,11%	0,13%	81.82%	Rp 1.949.401.927	Rp 1.592.440.916	81,69%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,12%	0,05%	158.33%	Rp 2.103.128.851	Rp 2.082.696.068	99.03%
<b>Jumlah</b>						Rp 8.993.568.798	Rp 7.770.607.817	86,40%
<b>Belanja Pendukung</b>						Rp 7.370.989.627	Rp 6.947.288.914,00	94.25%

**Tabel 3.38 Analisis efisiensi**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	147.50%	82.89%	17.11%
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	100%	81.69%	18.31%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	166.67%	99,03%	0,97%

#### Analisis Efisiensi

Dari ketiga Sasaran strategis, semua sasaran kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Jumlah penduduk terkendali Telah mencapai kinerja sebesar 147.50% dengan efisiensi anggaran 17.11%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh karena kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana cukup tinggi .
2. Sasaran Kekerasan terhadap perempuan menurun telah mencapai sasaran dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 18.31%. Efisiensi anggaran dikarenakan pencegahan kekerasan dengan media online seperti website dan film, sosialisasi dengan zoom meeting serta pemanfaatan jejaring kerja dalam pencegahan kekerasan dengan berbagai stakeholder, Lembaga kemasyarakatan, Ism dan akademisi.
3. Sasaran kekerasan terhadap anak menurun telah mencapai kinerja sebesar 166.67% dengan efisiensi anggaran 0,97%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran didukung dengan adanya upaya untuk tetap melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan dukungan teknologi melalui online/daring. Selain itu juga mengoptimalkan jejaring dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat. Juga upaya-upaya dalam membangun komitmen bersama bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tugas dan tanggungjawab bersama semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, kampus, media massa dan tidak ketinggalan keluarga.

### 3.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2021 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

#### 1. PISA

Dalam rangka pemenuhan hak anak atas informasi yang layak anak maka ditetapkan dua PISA yaitu PISA Taman Pintar dan PISA Pevita. Baik PISA Taman Pintar maupun PISA Pevita sebetulnya merupakan perpustakaan anak yang dikembangkan dengan dilengkapi berbagai sumber informasi dan sarana kreatifitas anak seperti kelas mendongeng, kelas menulis, sudut mainan anak pada Pevita dan panggung boneka pada Taman Pintar serta disediakan petugas pemberi layanan yang ramah anak dan telah memperoleh pelatihan tentang KHA

Pada tahun 2021 urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memperoleh penghargaan tingkat nasional dari KPAI (pusat) yakni penghargaan SIMEP (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan). Ada lima indikator yang menjadi acuan penilaian lomba anugerah KPAI tersebut, yaitu : regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, program dan anggaran, pelayanan kasus yang ditangani, perlindungan hukum dan system peradilan anak

#### 2. Hotline Service dan Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Aduan Kekerasan Anak dan Perempuan Berbasis Gender)

Dalam rangka memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat terkait adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender dan untuk mengakselerasi pelayanan penjangkauan terhadap korban kekerasan di wilayah, masyarakat sudah secara aktif menggunakan hotline service dan aplikasi SIKAP.

Dalam operasionalisasi Aplikasi SIKAP yang terintegrasi dengan JSS masih terdapat kendala, antara lain adanya beberapa menu dalam aplikasi SIKAP yang masih perlu disempurnakan. Untuk menyikapi adanya kendala tersebut maka dilakukan upaya mengoptimalkan koordinasi teknis dengan Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta (sebagai OPD pengampu rancang bangun aplikasi) agar dapat menyempurnakan aplikasi SIKAP

### 3. Mobil Gender Corner

Merupakan pengembangan dari Gender Corner, yang biasanya merupakan kegiatan yang menetap di Car Free Day ataupun di masyarakat. Mobil Gender Corner bersifat mobile dengan tujuan :

- i. Penjangkauan layanan konseling kepada masyarakat (jemput bola)
- ii. Perluasan jangkauan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Issue Gender di bidang politik, sosial, budaya, kesehatan dan ekonomi kepada masyarakat, sekolah, maupun kampus

### 4. Inisiasi Polsek Ramah Anak

Polsek Ramah Anak adalah inisiatif KPAID Kota Yogyakarta dalam mengisi bagian-bagian yang belum terjangkau. Keprihatinan kita bersama bahwa masih banyak anak-anak kita mengalami berhadapan dengan hukum. Kasus-kasus sederhana bahkan hingga kasus-kasus yang memprihatinkan. Kekerasan seksual oleh dan kepada anak-anak, kriminalitas di jalan oleh anak-anak, napza dan pornografi.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah amanat yang harus kita laksanakan dengan komitmen kuat agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan haknya serta mendapatkan rehabilitasi secara maksimal.

Polsek Ramah Anak adalah salah satu bagian dari dorongan kuat untuk mewujudkan SPPA secara maksimal dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam mengurai persoalan-persoalan agar Kota Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak.

Pada tahun 2021, telah terbentuk 2 (dua) polsekta ramah anak, yaitu Polsekta Gondokusuman dan Polsekta Kotagede

### 5. Inisiasi Masjid dan Gereja Ramah Anak

Masjid Ramah Anak (MRA) merupakan salah satu bentuk komitmen daerah dalam melindungi anak khususnya pada waktu mereka mengisi waktu luangnya. Diharapkan dengan ada MRA ini maka akan semakin banyak alternatif bagi anak untuk bermain di tempat yang terlindungi

MRA adalah satuan masjid sebagai ruang publik untuk beribadah (*mahdhah* dan *ghoiru mahdhah*), dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orangtua dan lingkungannya

Tujuan dibentuknya MRA diantaranya:

1. Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai ruang publik yang dikembangkan menjadi Pusat Kreativitas Anak dan menjadi tempat alternatif untuk anak-anak berkumpul,

melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. Mengoptimalkan fungsi masjid melalui berbagai kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi orangtua terkait pengasuhan dan kesejahteraan keluarga berbasis pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Inisiasi MRA dimulai dengan penunjukan Masjid Diponegoro, Kompleks Balaikota dan Masjid Baiturrahman, Kelurahan Wirogunan sebagai pelopor MRA

#### 6. Inisiasi Gereja Ramah Anak

Pembangunan kewilayahan, sektor pendidikan, kesehatan dan keagamaan adalah domain utama kewajiban pemerintah dalam pemenuhan layanan yang menuju peningkatan standar hidup masyarakat. Termasuk hal yang sangat penting pemenuhan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisah yaitu fasilitas keagamaan yang ramah anak. Rumah Ibadah Ramah Anak untuk memenuhi hak perlindungan yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan spiritual yang ramah anak, dan penyediaan fasilitas ibadah bagi anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dimana anak agar dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Tujuan dibentuknya Gereja Ramah Anak ini antara lain.

1. Menyediakan layanan Gereja Ramah Anak
2. Meningkatkan pemahaman Hak Anak di sektor layanan keagamaan
3. Sebagai wujud nyata penyediaan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) untuk inisiasi Gereja Ramah Anak dibentuklah Gereja Hagios Family dan Gereja Nyutran

7. Pemberdayaan ekonomi melalui dodolan kampung dan dakon perak (penguatan uppks, kampung kb, up2k pkk, kelompok rintisan usaha (kru)

8. Sinergi kegiatan di wilayah antara tp pkk, lpmk, pkb, opd terkait

9. Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (kie) melalui media interaktif

10. Peningkatan pengetahuan kependudukan melalui sekolah siaga kependudukan (ssk)

11. Gerakan orang tua sahabat remaja (go\_sahaja)

12. Formulir kartu kembang anak (kka) bantu melalui kegiatan posyandu

13. Video tutorial posyandu di masa pandemi covid\_19

14. SIM KB

15. Peningkatan kualitas pelayanan di UPT PPA dengan mewujudkan UPT PPA ber ISO 9001-2015

16. Penyaluran Alat dan obat Kontrasepsi bagi akseptor pil dan kondom dengan sistem jemput bola. PKB atau kader KB mendaftarkan kebutuhan pil dan kondom akseptor KB ulang yang kemudian disampaikan kepada Puskesmas setempat. Puskesmas setempat kemudian mengeluarkan sejumlah pil dan kondom yang diminta PKB/kader KB untuk diberikan kepada pasangan usia subur akseptor KB pil dan kondom ulang.

17. Bina pelayanan KB dilaksanakan dengan memperhatikan protokol keamanan covid, antara lain:

- penggunaan APD bagi nakes dan masker bagi calon akseptor KB
- skrining awal calon akseptor melalui google form
- pembagian waktu tindakan bagi setiap calon akseptor untuk menghindari kerumunan pada saat pelayanan

18. Memaksimalkan penggunaan media virtual/internet dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- Menyampaikan bahan-bahan KIE dan konsultasi kepada kader melalui WAG.
- Mekanisme pencatatan dan pelaporan dengan memanfaatkan media virtual
- Pemanfaatan media virtual untuk KIE program KKBPK

19. Penguatan ketahanan keluarga melalui penyusunan draft Peraturan Walikota tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga

20. Pembuatan flyer bagi kelompok UP2K PKK. Kelompok Rintisan Usaha (KRU) dan UPPKS unggulan sebagai penunjang promosi, selain itu melakukan pembinaan rutin kelompok UPPKS melalui BPC dan BPR AKU Sejahtera.

21. Pengadaan sarana kit siap nikah anti stunting dan BKB Kit stunting untuk mempermudah kader BKB dan konselor sebaya PIK R dalam penyampaian pesan, sehingga akan tercapai tujuan program KB dan diharapkan untuk menurunkan angka stunting dalam rangka mendukung capaian persentase kelompok kegiatan bina keluarga sebesar 32,48%

Penerima manfaat kegiatan adalah 10 kelompok BKB dan 10 kelompok PIK-R Kelurahan Stunting Kota Yogyakarta

- Kit Siap Nikah Anti Stunting
  - 1) Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo
  - 2) Kelurahan Terban Kemantren Gondokusuman
  - 3) Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen
  - 4) Kelurahan Wirobrajan Lemantren Wirobrajan
  - 5) Kelurahan Suryodiningratan Kemantren Mantrijeron

- 6) Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan
  - 7) Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan
  - 8) Kelurahan Semaki Kemantren Umbulharjo
  - 9) Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede
  - 10) Kelurahan Gunungketur Kemantren Pakualaman
- Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting
    - 1) Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan
    - 2) Kelurahan Terban Kemantren Gondokusuman
    - 3) Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan
    - 4) Kelurahan Wirobrajan Kemantren Wirobrajan
    - 5) Kelurahan Cokrodingratan Kemantren Jetis
    - 6) Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan
    - 7) Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan
    - 8) Kelurahan Panembahan Kemantren Kraton
    - 9) Kelurahan Warungboto Kemantren Umbulharjo
    - 10) Kelurahan Purwokinanti Kemantren Pakualaman

## 22. Pembinaan Kampung KB( Keluarga Berkualitas)

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Pada tahun 2021 di Kota Yogyakarta terdapat 45 Kampung KB, yaitu:

- 1) Kampung KB RW 04 Kel. Bener Kem. Tegalrejo
- 2) Kampung KB RW 07 Kel. Gowongan Kem. Jetis
- 3) Kampung KB RW 07 Kel. Baciro Kem. Gondokusuman
- 4) Kampung KB RW 14 Kel. Tegal panggung Kem. Danurejan
- 5) Kampung KB RW 01 Kel. Pringgokusuman Kem. Gedongtengen
- 6) Kampung KB RW 04 Kel. Notoprajan Kem. Ngampilan
- 7) Kampung KB RW 02 Kel. Gunungketur Kem. Pakualaman
- 8) Kampung KB RW 11 Kel. Pakuncen Kem. Wirobrajan
- 9) Kampung KB RW 15 Kel. Gedongkiwo Kem. Mantrijeron
- 10) Kampung KB RW 08 Kel. Kadipaten Kem. Kraton
- 11) Kampung KB RW 19 Kel. Brontokusuman Kem. Mergangsan
- 12) Kampung KB RW 12 Kel. Sorosutan Kem. Umbulharjo
- 13) Kampung KB RW 08 Kel. Rejowinangun Kem. Kotagede
- 14) Kampung KB RW 12 Kel. Prawirodirjan Kem. Gondomanan (2016)
- 15) Kampung KB Kampung Sudagaran Kel. Tegalrejo Kem. Tegalrejo
- 16) Kampung KB Kampung Bumijo Kel. Bumijo Kem. Jetis
- 17) Kampung KB Kampung Klitren Kel. Klitren Kem. Gondokusuman
- 18) Kampung KB Kampung Tegal Lempuyangan Kel. Bausasran Kem. Danurejan
- 19) Kampung KB Kampung Pajeksan Kel. Sosromenduran Kem. Gedongtengen
- 20) Kampung KB Kampung Ngampilan Kel. Ngampilan Kem. Ngampilan
- 21) Kampung KB Kampung Ketangungan kulon Kel. Wirobrajan Kem. Wirobrajan
- 22) Kampung KB Kampung Jogokariyan Kel. Mantrijeron Kem. Mantrijeron
- 23) Kampung KB Kampung Mangunnegaran Kel. Panembahan Kem. Kraton
- 24) Kampung KB Kampung Ratmakan Kel. Ngupasan Kem. Gondomanan
- 25) Kampung KB Kampung Kepatihan Kel. Purwokinanti Kem. Pakualaman
- 26) Kampung KB Kampung Bintaran Kel. Wirogunan Kem. Mergangsan
- 27) Kampung KB Kampung Sidobali Kel. Muja Muju Kem. Umbulharjo
- 28) Kampung KB Kampung Darakan Barat Kel. Prenggan Kem. Kotagede
- 29) Kampung KB Kampung Blunyahrejo Kel. Karangwaru Kem. Tegalrejo

- 30) Kampung KB Kampung Cokrokusuman Kel. Cokrodiningratan Kem. Jetis
- 31) Kampung KB Kampung Purbosati Kel. Terban Kem. Gondokusuman
- 32) Kampung KB Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan Kem. Wirobrajan
- 33) Kampung KB Kampung Minggiran Kel. Suryodinigratan Kem. Mantrijeron
- 34) Kampung KB Kampung Taman Kel. Patehan Kem. Kraton
- 35) Kampung KB Kampung Keparakan Lor Kel. Keparakan Kem. Mergangsan
- 36) Kampung KB Kampung Sidikan Kel. Pandeyan Kem. Umbulharjo
- 37) Kampung KB Kampung Ponggalan Kel. Giwangan Kem. Umbulharjo
- 38) Kampung KB Kampung Basen Kel. Purbayan Kem. Kotagede
- 39) Kampung KB Kampung Demangan Kel. Demangan Kem. Gondokusuman
- 40) Kampung KB Kampung Kotabaru Kel. Kotabaru Kemantren Gondokusuman
- 41) Kampung KB Kampung Suryatmajan Kel. Suryatmajan Kem. Danurejan
- 42) Kampung KB Kampung Kricak Kel. Kricak Kem. Tegalrejo
- 43) Kampung KB Kampung Warungboto Kel. Warungboto Kem. Umbulharjo
- 44) Kampung KB Kampung Semaki Kel. Semaki Kem. Umbulharjo
- 45) Kampung KB Kampung Tahunan Kel. Tahunan Kem. Umbulharjo

### **3.5 Koordinasi Lintas Sektor**

1. Koordinasi Lintas sektoral antara UPT PPA, PERADI dan Kepala Keadilan negeri Kota Yogyakarta. Dalam acara tersebut membahas tentang kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Peradi, Pengadilan Negeri dengan ada nya SPPA, maka perlindungan dan penanganan tidak hanya pada korban tapi juga menjangkau ke pelaku maupun saksi, perlunya menyesuaikan peraturan Walikota terkait perlindungan dan penanganan terhadap korban/pelaku/saksi pada kasus anak
2. Koordinasi dengan Universitas Proklamasi untuk pelaksanaan kegiatan edukasi parenting di wilayah Kota Yogyakarta. Ruang lingkup kegiatan ini berhubungan dengan edukasi parenting di wilayah Kota Yoyakarta
3. Koordinasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta untuk membangun komitmen bersama antara para pihak untuk bekerjasama dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kualitas keluarga di wilayah Kota Yogyakarta. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi; sinergitas program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di wilayah; Program penguatan fungsi keluarga; Program pemenuhan hak anak melalui program pengembangan hak partisipasi anak, dan ruang kreatifitas anak; Program pengembangan lembaga yang ramah anak seperti sekolah, tempat ibadah dan lainnya.

4. Koordinasi dengan SAPDA dalam rangka penanganan kasus kekerasan pada perempuan anak disabilitas
5. SP Kinasih terkait dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam menghadapi perubahan iklim
6. koordinasi dengan PSG UII terkait pendampingan pprg

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis ketiga sasaran, terdapat tiga indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2021, ketiga indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar > 100% dari total indikator.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :
  - a. Sasaran jumlah penduduk terkendali dengan capaian 147.50%
  - b. Sasaran kekerasan terhadap anak menurun dengan capaian 166.67%
  - c. Sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun dengan capaian 100%
3. Faktor pendorong Sasaran jumlah penduduk terkendali
  - a. Kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana cukup tinggi
4. Faktor pendorong Sasaran kekerasan terhadap anak menurun
  - a. Kesadaran, kepedulian serta keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kekerasan semakin tinggi.
  - b. UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga untuk pengaduan kekerasan sudah banyak dikenal masyarakat.
  - c. kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu dengan mensinergikan layanan yang berjejaring antara lain layanan kesehatan (RS, Puskesmas), hukum (kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PKBH UAD, LBH Jogja, PERADI), psikologis (Puskesmas, RSA, Ananda Mentari), layanan rumah aman (RDU, Rifka Annisa), rehabilitasi sosial (Dinas Sosial, BPRSW, BRSPA); pelayanan pendampingan hukum dan psikolog
  - d. Peran media sosial sebagai sarana informasi terjadinya tindak kekerasan mempercepat penjangkauan korban.

- e. peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pendampingan korban kekerasan yaitu dengan mengoptimalkan peran Satgas Sigrak, PKK, kampung KB, PIKR di wilayah melalui kegiatan penguatan kapasitas Satgas Sigrak dan pelatihan manajemen kasus di Kota Yogyakarta
5. Faktor pendorong sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun
  - a. Kesadaran, kepedulian serta keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kekerasan semakin tinggi.
  - b. UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga untuk pengaduan kekerasan sudah banyak dikenal masyarakat.
  - c. Peran media sosial sebagai sarana informasi terjadinya tindak kekerasan mempercepat penjangkauan korban.
  - d. kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu dengan mensinergikan layanan yang berjejaring antara lain layanan kesehatan (RS, Puskesmas), hukum (kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PKBH UAD, LBH Jogja, PERADI), psikologis (Puskesmas, RSA, Ananda Mentari), layanan rumah aman (RDU, Rifka Annisa), rehabilitasi sosial (Dinas Sosial, BPRSW, BRSPA); pelayanan pendampingan hukum dan psikolog
  - e. peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pendampingan korban kekerasan yaitu dengan mengoptimalkan peran Satgas Sigrak, PKK, kampung KB, PIKR di wilayah melalui kegiatan penguatan kapasitas Satgas Sigrak dan pelatihan manajemen kasus di Kota Yogyakarta
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai 14 indikator program, dari analisis ke 14 indikator program, 13 indikator program dapat tercapai dan 1 indikator program tidak tercapai, indikator program yang tidak tercapai adalah CPR (*contraceptive Prevalence Rate*). Indikator kinerja CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) tercapai 69,90%, dari target sebesar 73,94%, atau 94,53%.
7. Faktor penyebab ketidaktercapaian indikator program CPR (*contraceptive Prevalence Rate*):
  - a. Pasangan Usia Subur yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional masih cukup tinggi yaitu sebesar 8%
  - b. Adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan pelayanan melalui MKJP di rumah sakit tidak bisa diakses dengan efektif
8. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:
  - a. Optimalisasi KIE pada forum Fapsedu dan kegiatan di kampung KB
  - b. Koordinasi dengan OPD dan instansi terkait
  - c. Meningkatkan koordinasi lintas OPD/instansi antara lain Dinas Sosial, KPAI, PSM, UPT PPA, Disdikpora, Bagian Kesra, KPAI, Instansi vertikal, LSM, Bappeda untuk sinergitas yang lebih baik

- d. Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan seperti PATBM, Kelana, Dekelana dan SRA untuk meminimalisir terjadinya kekerasan anak
- e. Meningkatkan peran Puspaga dalam hal pencegahan melalui edukasi dan parenting maupun penjangkauan kepada anak/keluarga yang bermasalah.
- f. Peningkatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai wadah untuk konsultasi apabila sebuah keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga tidak berlanjut menjadi tindak kekerasan.
- g. Peningkatan peran PATBM dan mitra keluarga untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak.
- h. Penguatan melalui KIE ketahanan keluarga serta KIE melalui bina keluarga .
- i. Strategi 10 Aksi Berjarak sebagai wujud implementasi pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak di masa pandemi. Upaya yang dilakukan dengan sinergi antara berbagai pihak dan berjejaring.

9. **LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Lampiran 5. Rencana Aksi

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun Sebelumnya

Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima

## Lampiran 1. Struktur Organisasi



**Lampiran 2. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra lima tahun)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan					
				2017	2018	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga		2	2	2	2	2	2
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,65%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,74%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

*Wibisono*  
*Wibisono*

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55185 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL: dp3ap2kb@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

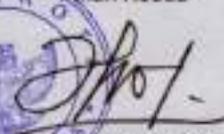
Nama : Ir. Edy Muhammad  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H HARYADI SUYUTI  
Jabatan : Walikota Yogyakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 26 JAN 2021  
Pihak Pertama  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Dan Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana

  
H. HARYADI SUYUTI

  
IR. EDY MUHAMMAD  
NIP. 196305191992031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.11%
2	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0.12%
3	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran	Keterangan
1.	Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Rp1.075.746.978	APBD 2021
2.		Program perlindungan perempuan	Rp1.150.708.412	APBD 2021 DAK
3.	Program perlindungan anak	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Rp1.398.606.461	APBD 2021
4.		Program perlindungan khusus anak	Rp926.683.520	APBD 2021 DAK
5.	Program pengendalian penduduk	Program pengendalian penduduk	Rp1.288.868.200	APBD 2021 DAK
6.		Program peningkatan kualitas keluarga	Rp268.165.000	APBD 2021
7.		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Rp50.565.000	APBD 2021 DAK
8.	Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Rp1.661.158.040	APBD 2021 DAK
9.		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Rp1.418.539.120	APBD 2021 DAK
10.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.726.987.022	APBD 2021 DAK
11.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
<b>Jumlah Anggaran</b>			<b>Rp17.966.029.751</b>	

Walikota Yogyakarta



*[Handwritten Signature]*  
H. HARYADI SUYUTI

Yogyakarta, 26 JAN 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Dan Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana



*[Handwritten Signature]*  
Ir. EDY MUHAMMAD  
NIP. 195306161992031006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦂꦠ  
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦿꦪꦩꦤꦸꦥꦸꦤ  
ꦥꦼꦂꦭꦶꦤꦝꦸꦁꦏꦏꦸꦁꦏꦼꦭꦸꦁꦧꦼꦂꦺꦤꦠꦏꦼꦩꦼꦁꦁꦏꦼꦭꦸꦁꦧꦼꦂꦺꦤꦠꦏꦼꦩꦼꦁꦁ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55185 Telp. (0274) 515885, 562882

EMAIL: dp3ap2kb @jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. EDY MUHAMMAD

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H HARYADI SUYUTI

Jabatan : Walikota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 19 OCT 2021

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana



H. HARYADI SUYUTI



Ir. EDY MUHAMMAD

NIP. 196309161992031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2021
1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.11%
2	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0.12%
3	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Perubahan 2021	Keterangan
1.	Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Rp 802.683.976	P-APBD 2021
2.	Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Program perlindungan perempuan	Rp 1.148.517.951	P-APBD 2021 DAK
3.	-	Program peningkatan kualitas keluarga	Rp 247.305.000	P-APBD 2021
4.	-	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Rp 8.040.000	P-APBD 2021
5.	Program perlindungan anak	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Rp 1.253.998.861	P-APBD 2021
6.		Program perlindungan khusus anak	Rp 849.129.990	P-APBD 2021 DAK
7.	Program pengendalian penduduk	Program pengendalian penduduk	Rp 274.305.900	P-APBD 2021 DAK
8.	Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Rp 3.288.748.780	P-APBD 2021 DAK
9.	Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Rp 1.122.638.340	P-APBD 2021 DAK

No	Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Perubahan 2021	Keterangan
10.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.370.989.627	P-APBD 2021
11.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Jumlah Anggaran			Rp 16.364.558.425	

Yogyakarta, 19 OCT 2021

Wali Kota Yogyakarta



H. HARYADI SUYUTI

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana



H. EDY MUHAMMAD  
NP 196309161992031006



Lampiran 5. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PERLUAN KINERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021  
 DINAS PEMBENDAYAN PEREMPUAN  
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGELOMPOKAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Indikator	Target 2021				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2021				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	6,11 %	6,11 %	6,11 %	6,11 %	<b>PROGRAM PENYARUTAMAAN GENDER DAN PEMBENDAYAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase kelembagaan Penyarusutamaan Gender (PUG) yang aktif</b>	<b>6,09 %</b>	<b>26,00 %</b>	<b>60,00 %</b>	<b>72,22 %</b>	<b>802.802.974</b>
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		24,53 %	32,00 %	100,00 %	100,00 %	51.740.000
							OPD yang melaksanakan ARO	41,00 OPD	4,00 %	4,00 %	100,00 %	100,00 %	6.516.000
							Perumusan Kebijakan PUG	1,00 dokumen	25,00 %	33,00 %	100,00 %	100,00 %	81.480.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kecamatan Kabupaten/Kota		11,65 %	25,75 %	50,00 %	100,00 %	66.533.040
							Koordinasi dan Evaluasi Penyarusutamaan Gender (PUG) dan Kelembagaan PUG	1,00 dokumen pendukung	18,00 %	42,00 %	80,00 %	100,00 %	47.843.040
							Gender Champion	4,00 perempuan	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	26.655.000
							Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik/Sosial dan Ekonomi		37,20 %	56,23 %	94,90 %	100,00 %	36.720.000
							Mutakhir Perempuan	90,00 orang	0,00 %	0,00 %	20,00 %	100,00 %	4.286.000
							Pendidikan politik perempuan	250,00 orang	40,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %	35.200.000
							Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik/Sosial dan Ekonomi		14,15 %	31,19 %	73,94 %	98,41 %	125.040.000
							Kecamatan Lokal P2WKSS yang didampingi	0,00 kelompok	0,00 %	20,00 %	80,00 %	100,00 %	17.585.000
							Pendampingan kegiatan organisasi perempuan	20,00 organisasi	17,00 %	57,00 %	75,00 %	100,00 %	75.770.000
							Peningkatan kelompok prima antara (ributan usaha, desa prima, insani usaha insani)	40,00 kelompok	20,00 %	80,00 %	80,00 %	100,00 %	100.470.000
							Penggiatan hari besar perempuan dan hari anti kekerasan	0,00 kali	0,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %	10.590.000
							Selges Terakur Sapatng Iku yang diklatangi	14,00 selges	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	8.188.000
							Positban Percepatan Online	20,00 Orang	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		6,00 %	19,00 %	26,00 %	100,00 %	6.478.000
							Pendampingan kegiatan PUSPA	30,00 orang	0,00 %	16,00 %	25,00 %	100,00 %	8.875.000
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		14,00 %	43,00 %	63,00 %	100,00 %	499.366.936
							Peningkatan kapasitas organisasi perempuan	3,00 lembaga	14,00 %	43,00 %	63,00 %	100,00 %	660.060.936
							Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		9,49 %	28,64 %	67,42 %	100,00 %	14.420.000
							Gender Corner	540,00 orang	13,00 %	26,00 %	42,00 %	100,00 %	6.925.000
							Sosialisasi KIE Pemberdayaan Perempuan	90,00 orang	0,00 %	48,00 %	100,00 %	100,00 %	11.170.000
							<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani</b>	<b>16,00 %</b>	<b>28,00 %</b>	<b>60,00 %</b>	<b>83,20 %</b>	<b>1.146.917.061</b>

RENCANA AKSI PERLUAN KINERJA

PERANGKAT  
DAERAH  
TAHUN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
:2021

No	Sasaran	Indikator	Target 2021				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2021				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		16,00 %	21,00 %	100,00 %	100,00 %	4.366.000
							pembentukan tim TPPO	1,00 tim	10,00 %	21,00 %	100,00 %	100,00 %	6.216.000
							<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		4,11 %	81,40 %	84,43 %	100,00 %	81.161.000
							pelatihan penanganan korban kekerasan bagi masyarakat	3,00 kecamatan	2,00 %	4,00 %	80,00 %	100,00 %	43.166.000
							Pelatihan penjangkauan korban kekerasan dan identifikasi awal kronologi kasus	105,00 orang	3,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	21.371.000
							Penyediaan Data Kekerasan	1,00 dokumen	10,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	10.700.000
							<b>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		7,00 %	43,00 %	66,00 %	100,00 %	64.126.780
							Koordinasi dengan Jejaring antara Lembaga Penyedia Layanan	7,00 kali	7,00 %	43,00 %	58,00 %	100,00 %	60.803.040
							<b>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender</b>		20,27 %	41,74 %	66,20 %	99,99 %	640.586.171
							Penganganan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender	50,00 kasus	24,99 %	40,98 %	76,03 %	100,00 %	340.591.372
							Pendampingan rehabilitasi korban kekerasan	1,00 kasus	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	10.866.000
							Peningkatan kapasitas pengasuhan risiko pada lokasi	4,00 kecamatan	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	15.860.000
							Peningkatan kualitas pelayanan berbasis ISO	1,00 dokumen	1,00 %	16,00 %	24,00 %	100,00 %	75.860.000
							Penyusunan SOP/SPP dan SKM	2,00 dokumen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	5.276.000
							<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender</b>		14,72 %	44,33 %	73,63 %	100,00 %	539.706.000
							koordinasi forum atgas agrik	105,00 orang	10,00 %	43,00 %	73,00 %	100,00 %	520.560.000
							pelatihan penjangkauan korban kekerasan dan identifikasi awal kronologi kasus	105,00 orang	3,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	14.010.000
							<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan/Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		13,00 %	66,00 %	86,00 %	100,00 %	10.570.000
							sosialisasi tidak pidana perdagangan orang	40,00 orang	13,00 %	65,00 %	80,00 %	100,00 %	10.070.000
2	kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHIA)</b>	Persentase Jumlah Keluhan Layak Anak	95,00 %	95,00 %	95,00 %	100,00 %	1.253.990.881

RENCANA AKSI PERLUNGAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEMERUPAN  
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 2021

No	Sasaran	Indikator	Target 2021				Program/Kegiatan/Kelas	Tipe Ukur Program/Kegiatan	Target 2021				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Perserikatan, Media dan Dunia Usaha Kawasan Kabupaten/Kota</b>		<b>18,08 %</b>	<b>37,49 %</b>	<b>76,62 %</b>	<b>82,28 %</b>	<b>1.108.263.881</b>
							Inisiasi Masjid Ramah Anak	1.00 masjid	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	5.376.875
							Inisiasi Rumah Sakit Ramah Anak	1.00 rumah sakit	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	5.258.750
							Kelana (Kecamatan Layak Anak) yang didampingi Kongres Anak Kota Yogyakarta	14.00 kecamatan	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	43.976.250
							1.00 kali	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19.956.250	
							Monevring Anak Tingkat Kota Yogyakarta	30.00 orang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	14.666.000
							Pelatihan K0-IA (Komisi Hak Anak) bagi pendidik dan tenaga pendidik	30.00 sekolah	0.00 %	20.00 %	100.00 %	100.00 %	6.823.750
							Pendampingan Kelurahan	10.00 kelurahan	0.00 %	30.00 %	100.00 %	100.00 %	26.076.000
							Pendampingan TPA Beringharjo, TPA Prastadama dan KB Klana	3.00 lembaga	18.00 %	38.00 %	74.00 %	100.00 %	917.871.338
							Pengantar KHA (Komisi Hak Anak) bagi pegawal pelayanan di Pusat Kreativitas Anak, PISA (pusat informasi sahabat anak) TEGA (teman sahabat anak), rumah sakit ramah anak, dan masjid ramah anak	35.00 orang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.666.000
							Pengutan dan Pengembangan KHA	198.00 KHA	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	13.560.000
							Pengutan Forum Anak Kelurahan	14.00 forum anak	0.00 %	0.00 %	85.00 %	100.00 %	46.738.250
							Pengutan Kelurahan Forum Anak Kota	30.00 orang	15.00 %	25.00 %	80.00 %	100.00 %	17.266.500
							Pengutan Peras Media Massa dan Dunia Usaha dalam pengembangan KHA	2.00 lembaga	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	9.676.000
							Youth Supercano dan Jembatan Persahabatan	120.00 orang	0.00 %	0.00 %	55.00 %	100.00 %	46.166.000
							Facilitasi Pemilukong Rumah Anak	1.00 kegiatan	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0
							<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kawasan Kabupaten/Kota</b>		<b>6,11 %</b>	<b>21,89 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>93.126.000</b>
							Pengumpulan Data Indikator KHA (Kota Layak Anak) yang valid dan update	1.00 dokumen	13.00 %	35.00 %	100.00 %	100.00 %	66.876.000
							Penyusunan Profil Anak	1.00 dokumen	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	35.000.000
							Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<b>11,00 %</b>	<b>21,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>36.730.000</b>
							Penggiatan Hari Anak Nasional	1.00 kali	11.00 %	21.00 %	100.00 %	100.00 %	102.486.000
							Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>16.880.000</b>
							Pengutan Gagas Tugas KHA	110.00 orang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16.880.000
							<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>849.129.000</b>

RENCANA AKSI PERLUNGAN KONDISI

PERANGKAT DAERAH TAHUN  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 2021

No	Sasaran	Indikator	Tingkat 2021				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Tingkat 2021				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>16,21 %</b>	<b>42,78 %</b>	<b>86,24 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>282.574.999</b>
							Kelas Parenting Puspaga	6.00 kali	25,00 %	43,00 %	45,00 %	100,00 %	6.500.000
							Monor SRA dan Luar	38.00 Lokasi	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	4.180.000
							Pelatihan Penyusunan CPP	14.00 sekolah	90,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	4.832.400
							Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12.00 bulan	16,00 %	45,00 %	75,00 %	100,00 %	86.513.640
							Pembentukan kelompok Sekolah Ramah Anak	25.00 sekolah	4,00 %	35,00 %	91,00 %	100,00 %	80.563.640
							Pembentukan PATBM (Perkumpulan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	9.00 PATBM	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	17.144.750
							Pendampingan PATBM	10.00 PATBM	0,00 %	44,00 %	75,00 %	100,00 %	87.844.290
							Penyusunan Pengembangan Petunjuk Teknis Sekolah Ramah Anak (SRA)	1.00 dokumen	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	80.000.000
							<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>18,91 %</b>	<b>49,40 %</b>	<b>77,62 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>447.721.000</b>
							Facilitasi KPAI Kota Yogyakarta	1.00 Lembaga	19,00 %	21,00 %	77,00 %	100,00 %	397.737.000
							perlitungan khusus korban kekerasan dan eksploitasi, pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas ABH dan stigma	1.00 laporan	25,00 %	55,00 %	94,00 %	100,00 %	16.884.000
							Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (DKA)	5.00 kali	15,00 %	30,00 %	75,00 %	100,00 %	35.840.000
							<b>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender</b>		<b>18,98 %</b>	<b>42,05 %</b>	<b>78,98 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>88.289.000</b>
							Pelayanan perlindungan khusus anak	10.00 kasus	74,00 %	80,00 %	90,00 %	100,00 %	12.200.000
							Penanganan korban kekerasan terhadap anak	20.00 kasus	24,90 %	49,58 %	76,00 %	100,00 %	21.790.000
							Pendampingan Rehabilitasi korban anak	1.00 dokumen	0,00 %	30,00 %	100,00 %	100,00 %	37.940.000
							Penyusunan pedoman pelayanan terhadap anak	125.00 buku	0,00 %	7,00 %	53,00 %	100,00 %	20.545.000
							<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyalangan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>34.276.000</b>
							Peningkatan Kapasitas Layanan Terkait Perlindungan Khusus Anak	1.00 kali	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	40.000.000
							<b>Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender</b>		<b>1,00 %</b>	<b>3,37 %</b>	<b>96,31 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>33.760.000</b>
							Diseminasi informasi tentang perlindungan khusus anak di locus	200.00 orang	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	31.480.000
							Pengelolaan sistem pendataan dan pelaporan anak dalam perlindungan khusus	12.00 dokumen	24,90 %	49,99 %	74,97 %	100,00 %	2.280.000

RENCANA AKSI PERLUNJUAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 2021

No	Gesam	Indikator	Target 2021				Program/Kegiatan/Keluaran	Tipe Ukur Program/Kegiatan	Target 2021					Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1							Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian Kabupaten/Kota Upti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender Forum Koordinasi Lintas Sektor	1.00 dokumen	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	2.400.000	
3	jumlah penduduk terkecil	rata-rata jumlah anak dalam keluarga	1,20 anak	1,20 anak	1,20 anak	2,00 anak	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Perentase lembaga layanan keluarga yang aktif	40,00 %	60,00 %	60,00 %	87,47 %	247.305.000	
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kementerian Kabupaten/Kota		0,00 %	0,00 %	18,95 %	100,00 %	9.500.000	
							Advokasi Kebijakan 5 Pilar Dimensi Kesehatan Keluarga	1.00 Dokumen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0	
							Penasi Ketahanan Keluarga	1.00 Dokumen	0,00 %	0,00 %	25,00 %	100,00 %	20.170.000	
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6,13 %	18,26 %	18,26 %	100,00 %	13.860.000	
							Pendampingan Lembaga layanan Keluarga di Tingkat Kota	20.00 Lembaga	0,13 %	10,20 %	10,20 %	100,00 %	21.800.000	
							Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		33,33 %	60,00 %	60,00 %	100,00 %	223.865.000	
							Pendampingan Pobjanal Posyandu	010.00 Posyandu	33,33 %	60,00 %	60,00 %	100,00 %	226.065.000	
							<b>PROGRAM PENSELECLAAR SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Perentase lembaga yang melaksanakan data pilah	20,00 %	40,00 %	40,00 %	82,00 %	8.840.000	
							Penyediaan Data Gender dan Anak di Kementerian Kabupaten/Kota		0,00 %	60,00 %	100,00 %	100,00 %	1.320.000	
							Penyediaan Data Gender dan Anak	1.00 dokumen	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	6.000.000	
							Penyaji dan Personalisasi Data Gender dan Anak dalam Keberbagaian Data di Kementerian Kabupaten/Kota		0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	4.120.000	
							Penyaji dan personalisasi Data Gender dan Anak	1.00 Kegiatan	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	26.776.000	
							<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	CBR (Crude Birth Rate)	7,48 CBR	7,48 CBR	7,48 CBR	11,10 CBR	274.305.000	
							Advokasi Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalar Formal di Satuan Pendidikan Jergang SD/MI dan SLTP/WTS/Jalur Nonformal dan Informal		0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	3.545.000	
							Advokasi Sekolah Riega Kependudukan	05.00 orang	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	3.675.000	
							Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kapan Dampak Kependudukan Bersama Model Sobat Strategic sebagai Peringatan Diri Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kebijakan		18,94 %	31,80 %	66,63 %	100,00 %	133.066.340	

RENCANA AKSI PERJALANAN KONGRA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAPULI : 2021

No	Sasaran	Indikator	Target 2021				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2021				Anggaran
			Ta I	Ta II	Ta III	Ta IV			Ta I	Ta II	Ta III	Ta IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Alokasi Pasokan Kependudukan bagi kampung KB	50.00 orang	23.00 %	46.15 %	85.32 %	100.00 %	82.119.129
							Perencanaan Fapadu Tentang Kajian Dampak Kependudukan bagi Komunitas Keagamaan dan Remaja Lintas Agama	14.00 Kecamatan	0.00 %	0.00 %	88.00 %	100.00 %	76.640.900
							<b>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</b>		<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>8.266.900</b>
							pengendalian program KKBPK melalui pertemuan kelompok kecil dan pertemuan mekanisme operasional tri lapang di kampung KB	45.00 kampung KB	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8.266.900
							<b>Pembinaan dan Penguasaan Pengetenggaraan Sistem Informasi Keluarga</b>		<b>33.30 %</b>	<b>66.67 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>23.940.900</b>
							Pembinaan pengumpulan dan pengolahan data berbasis perkembangan informasi teknologi oleh BPH	2.00 jarkes	33.30 %	66.67 %	100.00 %	100.00 %	34.600.900
							<b>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</b>		<b>18.18 %</b>	<b>45.45 %</b>	<b>85.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.760.900</b>
							Pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data	1.00 laporan	18.18 %	45.45 %	85.00 %	100.00 %	139.246.900
							Pengurusan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1.00 dokumen	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8
							<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>10.92 %</b>	<b>11.00 %</b>	<b>11.09 %</b>	<b>11.19 %</b>	<b>3.299.740.798</b>
							<b>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Bala Persebaran KKBPK</b>		<b>28.80 %</b>	<b>48.80 %</b>	<b>78.80 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>139.850.900</b>
							Operasional Pembinaan dan KIE di Bala Persebaran	2.00 Bala Persebaran KB	25.00 %	49.00 %	75.00 %	100.00 %	139.800.900
							<b>Pengendalian Program KKBPK</b>		<b>22.80 %</b>	<b>34.10 %</b>	<b>62.90 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>131.865.790</b>
							Pengajian Data dan Informasi Perkembangan Capaian Program KB	2.00 Laporan	22.80 %	50.10 %	92.90 %	100.00 %	131.820.940
							<b>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</b>		<b>26.00 %</b>	<b>46.00 %</b>	<b>66.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>116.250.900</b>
							Dukungan Pelaksanaan pelayanan KB melalui operasional distribusi stok dan pembinaan faskes KB	50.00 Faskes	20.00 %	40.00 %	60.00 %	100.00 %	116.250.900
							<b>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</b>		<b>6.12 %</b>	<b>26.88 %</b>	<b>65.40 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>949.215.900</b>
							Pemenuhan Kelengkapan Gudang Alat dan Obat	3.00 Paket	0.10 %	23.00 %	93.12 %	100.00 %	624.715.900
							Pemenuhan Sarana Penunjang Pelayanan KB bagi Faskes Pemerintah dan Swasta	27.00 unit	0.00 %	32.50 %	100.00 %	100.00 %	314.500.900
							<b>Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</b>		<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>4.030.900</b>
							Komunikasi Informasi Edukasi Media Pemasar Persalinan dan Pasca Keguguran	66.00 Faskes	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.000.900
							<b>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</b>		<b>18.00 %</b>	<b>48.00 %</b>	<b>71.30 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>111.366.900</b>
							Bala Sosial Pelayanan KB Gerak	0.00 PUSK	18.00 %	48.00 %	71.30 %	100.00 %	110.666.900
							<b>Penyediaan dan Distribusi Sarana KB Program KKBPK</b>		<b>8.40 %</b>	<b>18.80 %</b>	<b>65.90 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>179.796.900</b>

KENDARAAN POLISI/ANAKRIBETAP

PERANGKAT  
DAFTAR  
TAMBAH

DINAS PEMERINTAHAN PROPINSI  
PETA, KECAMATAN, ALAK, DAN PENGELOLAAN  
PENGUSAHA DAN KOLABORASI BERTUMBUH

No	Subsidi	Subsidi	Target 2017				Program/Keperluan/Postoran	Total 2017 Program/Keperluan/Postoran	Target 2017				Anggaran
			Ta 1	Ta 2	Ta 3	Ta 4			Ta 1	Ta 2	Ta 3	Ta 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							Mobilisasi	1.000.000,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	101.232.000,00
							Pengembangan Kader melalui Bimbingan/Pelatihan (BPP)	21.000.000,00	40,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	211.800.000,00
							Pengembangan pengetahuan dan keterampilan para pejabat	1.000.000,00	20,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	211.800.000,00
							Peningkatan Kapasitas Pengawasan Wilayah	5.000.000,00	20,00 %	75,00 %	100,00 %	100,00 %	211.800.000,00
							Bantuan Logistik (Bantuan Logistik)	127.200.000,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	211.800.000,00
							Bantuan Logistik (Bantuan Logistik)	10.000.000,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
							Pelaksanaan dan Pengembangan Program KEMERDEKAAN	5.000.000,00	10,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	200.007.000,00
							Penyediaan Bantuan Logistik Berbasis Restoran	2.000.000,00	10,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %	201.000.000,00
							Penyediaan Bantuan Logistik Berbasis Restoran	1.000.000,00	10,00 %	100,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00
							Penyediaan Bantuan Logistik Berbasis Restoran	1.000.000,00	10,00 %	100,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00

Tanggal

*[Signature]*  
 Y. J. J. J.  
 NIP. 196304198331000

**Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun Sebelumnya**

NO	REKOMENDASI	RINCIAN RTL	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PELAKSANA	PENANGGUNGJAWAB
1	<p>Menyempurnakan Dokumen mekanisme</p> <p>Pengumpulan data kinerja dengan melengkapi keterangan adanya waktu delivery dan batas waktu pelaksanaan aktivitas tersebut</p>	<p>Melengkapi keterangan waktu delivery dan batas waktu pelaksanaan pada dokumen mekanisme pengumpulan data</p>	<p>Akhir Juni 2021</p>	<p>KSB PEP</p> <p>KSB Keuangan</p> <p>KSB UK</p>	<p>Sekretaris</p>
2	<p>Melaksanakan Monitoring berkelanjutan dengan menambahkan status penyelesaian atas pelaksanaan rekomendasi atau hasil tindak lanjut catatan hasil evaluasi yang menyatakan apakah telah selesai sedang terlaksana atau belum terlaksana, personil yang bertanggungjawab dan batas waktu pelaksanaan</p>	<p>Pelaksanaan Pengendalian TL LHE/Romendasi dalam format Kendali</p>	<p>Setiap ada progress TL</p>	<p>KSB PEP</p> <p>KSB KEuangan</p> <p>KSB UK</p>	<p>Sekretaris</p>
3	<p>Mengkaji ulang penerapan reward and punishment dengan mempertimbangkan informasi pada laporan kinerja</p>	<p>Pelaksanaan monev capaian kinerja keuangan dan Fisik (setiap bulan) yang dituangkan dalam BA Capaian Kinerja Bulanan</p> <p>Pelaksanaan monev capaian renja/ TW yang dituangkan dalam BA Capaian Renja /TW</p>	<p>Setiap Bulan</p> <p>Setiap TW</p>	<p>KSB PEP</p> <p>KSB Keuangan</p> <p>KSB UK</p>	<p>Sekretaris</p>
4	<p>Memfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment</p>	<p>Pelaksanaan monev capaian kinerja keuangan dan Fisik (setiap bulan) yang dituangkan dalam BA Capaian Kinerja Bulanan</p>	<p>Setiap Bulan</p> <p>Setiap TW</p>	<p>KSB PEP</p> <p>KSB Keuangan</p>	<p>Sekretaris</p>

NO	REKOMENDASI	RINCIAN RTL	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PELAKSANA	PENANGGUNGJAWAB
		Pelaksanaan monev capaian renja/ TW yang dituangkan dalam BA Capaian Renja /TW		KSB UK	
5	Mengoptimalkan pendokumentasian terhadap data kinerja dari perbaikan kinerja dengan menyusun SOP monitoring pencapaian kinerja kinerja eselon	Mereviu SOP monitoring pencapaian kinerja Eselon dan melengkapi BA Capaian Kinerja	Juli 2021	KSB PEP	Sekretaris
6	Mendokumentasikan secara berkala kegiatan evaluasi program/rencana aksi (termasuk keterlibatan pimpinan) dalam upaya perbaikan kinerja	- Sudah dilakukan sejak Januari 2021 dan akan diterbitkan Rekomendasi Ka. DP3AP2KB dalam rangka capaian Renja dan Capaian Kinerja Organisasi	Juli 2021	KSB PEP	Sekretaris
7	Mengkaji mekanisme penerapan pemanfaatan informasi kinerja laporan kinerja untuk penilaian kinerja	Akan memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai instrument perbaikan perencanaan , menilai dan memperbaiki pelaksanaan program , peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Pada saat persiapan penyusunan program dan kegiatan selanjutnya	KSB PEP	Sekretaris

## **Lampiran 7. Penghargaan yang diterima DP3AP2KB**

1. PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK KATEGORI UTAMA TAHUN 2021
2. SIMEP KPAI TAHUN 2021 KATEGORI TERBAIK ( JUARA 1 )
3. SERTIFIKASI ISO 9001:2015